

MS/18 (7)

FRANZ MAGNIS-PUSENO

Ajaran Sosial Gereja

(1983)

MS/18
(7)

Franz Magnis-Suseno S.J.

Gereja berhadapan dengan ketidakadilan

Ajaran Sosial Katolik

Diktat untuk keperluan mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara

JAKARTA 1983

GEREJA BERHADAPAN DENGAN KETIDAKADILAN: AJARAN SOSIAL KATOLIK

DIKTAT PENUNJANG KULIAH-KULIAH AJARAN SOSIAL GEREJA KATOLIK

oleh

Dr. Franz Magnis Suseno SJ

Bab I: Pengantar permasalahan

1. Pendahuluan

"Hendaknya tuan-tuan pastor menyibukkan diri dengan jiwa-jiwa umat mereka, mengamalkan cinta pada sesama, tetapi jangan memasuki bidang politik karena itu bukan urusan mereka". Kalimat ini bukan ucapan seorang diktator di Amerika Latin, melainkan kritik Kaisar Wilhelm II dari Jerman Raya tahun 1896 yang diarahkan kepada iman-iman dan pendeta-pendeta yang bekerja di kalangan kaum buruh.

Ternyata sudah lebih dari seratus tahun yang lalu ada iman-iman yang mulai memasuki dunia perburuhan, dan sejak semula pun usaha itu ditentang oleh pelbagai penguasa, pengusaha dan anggota umat yang saleh. Dokumen resmi pertama pimpinan Gereja Katolik mengenai permasalahan sosial, ensiklik "Rerum Novarum" Paus Leo XIII, terbit hampir seratus tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 1891. Sejak itu "Ajaran Sosial Gereja Katolik" terus bertambah dan berkembang. Dokumen terakhir sementara ini adalah ensiklik "Laborem Exercens" yang diterbitkan oleh Paus Johannes Paulus II pada tanggal 14 September 1981.

2. Apa itu Ajaran Sosial Gereja?

Dengan Ajaran Sosial Gereja Katolik dimaksud segala macam ajaran Gereja tentang tatasusunan masyarakat yang adil. Ajaran itu terutama menyangkut kehidupan sosial ekonomis. Ajaran Sosial Gereja semula merupakan tanggapan Gereja terhadap apa yang pada waktu itu disebut "masalah sosial", yaitu nasib buruk kaum buruh industri. Dari situ ajaran Gereja semakin meluas menjangkau masalah kemiskinan, diskriminasi, penindasan, dan segala bentuk ketidakadilan.

Keterlibatan Gereja tidak tinggal teoretis saja. Walaupun harus diakui bahwa sebagian besar umat Katolik belum sungguh-sungguh tersentuh oleh masalah ketidakadilan di dunia, namun makin banyak kelompok dan umat-umat Gereja dipelbagai daerah melibatkan diri dalam perjuangan demi penegakan keadilan.

3. Sisipan: kekurangan dan ketidakadilan

Ajaran Sosial Gereja sejak semula berpusat pada masalah keadilan. Itu tidak kebetulan. Ternyata kemiskinan dan ketakberdayaan golongan-golongan lemah di seluruh dunia berkaitan dengan ketidakadilan, sebagaimana dapat dilihat dari contoh berikut: Ada sekelompok turis yang dalam rangka perjalanan safari sampai ke sebuah oase (wahah). Semua merasa haus. Banyaknya air dalam sumur terbatas. Apakah hanya mereka yang pertama sempat minum akan mendapat air? Apabila dalam pembagian air semua diperhatikan secara solidier, air bisa cukup bagi semua. Tidak ada yang harus menderita haus. Tetapi ternyata ada beberapa anggota kelompok yang berhasil untuk menguasai pembagian air itu. Sekarang yang mau minum harus membayar atau menyerahkan perhiasannya. Maka terbentuklah pasar di mana air ditukar dengan barang-barang lain. Sebagai akibat banyak orang tidak lagi dapat minum karena tidak mempunyai cukup uang atau barang dagangan lain. Air sebagai bahan pokok kehidupan menjadi kurang. Bukankah persediaan air, walaupun memang terbatas, sebenarnya menoukupi untuk semua? Lan-

tas mengapa air kurang juga? Alasannya terletak dalam pengaturan pembagian air: air tidak dibagi menurut kebutuhan, melainkan menurut kemampuan untuk membayar. Pengaturan itu berdasarkan kenyataan bahwa sumber air dikuasai oleh sekelompok orang tertentu.

Cerita kecil ini memperlihatkan bahwa kemiskinan, yaitu keadaan di mana manusia tidak dapat memenuhi segala kebutuhan dasar, untuk sebagian besar tidak berdasarkan kekurangan persediaan, meskipun persediaan barangkali tidak berlimpah-limpah, melainkan berdasarkan pembagian yang tidak merata, berdasarkan ketidakadilan. Ketidakadilan itu adalah akibat struktur kekuasaan.

4. Jaman sekarang

Pada jaman sekarang semakin disadari bahwa masalah sosial internasional yang paling besar terletak pada adanya struktur-struktur yang tidak adil dalam kehidupan ekonomis, sosial, politis dan budaya bangsa-bangsa dan dalam hubungan internasional. Karena struktur-struktur itu ada kelas-kelas dan massa rakyat yang tidak dapat bebas dari kemiskinan dan tak berdaya untuk menentang penghisapan tenaga kerja mereka, terutama di benua Asia, Afrika, Amerika Tengah dan Selatan, tetapi juga di negara-negara industri modern. Struktur-struktur yang tidak adil itu berdasarkan struktur-struktur kekuasaan yang tidak seimbang.

Maka bagi Gereja yang merasa prihatin terhadap semua orang, golongan dan bangsa yang menderita, ketidakadilan struktural merupakan salah satu tantangan utama jaman sekarang dalam pewartaan cintakasih dan keselamatan Allah. Gereja Indonesia pun merasa ditantang untuk ikut berusaha agar dibangun suatu masyarakat Indonesia yang makmur dan adil.

Berhadapan dengan masalah ketidakadilan Gereja Katolik mengembangkan ajaran sosialnya. Maka perlu ajaran itu kita ketahui.

Bab II: Injil dan masalah keadilan

Dalam bab ini kami membahas dasar teologis keterlibatan Gereja dalam pembangunan masyarakat yang adil. Kita mulai pada pokok dasar iman kristiani, Yesus Kristus.

1. Yesus Kristus dan keadilan

a. Yesus bukan pembebas sosial

Pertama harus ditegaskan bahwa Yesus Kristus bukan seorang pembebas sosial. Terhadap masalah penjajahan Roma, masalah sosial politik paling hangat di hati orang-orang Israel waktu itu, Yesus nampak acuh-tak-acuh. Ia tidak hanya bergaul dengan orang kecil, tetapi mempunyai banyak hubungan dengan kalangan atas, termasuk mereka yang korup (para "pemungut bea"). Dibandingkan dengan beberapa nabi Perjanjian Lama yang amat keras dalam menghardik ketidakadilan (misalnya Amos, Mikha, Yesaya), Yesus tidak kelihatan memberi banyak perhatian terhadap ketidakadilan-ketidakadilan yang terdapat dalam masyarakat waktu itu. Contoh-contoh yang kadang-kadang dikemukakan untuk memperlihatkan bahwa Yesus seorang revolusioner sosial terlalu dicari-cari saja atau berdasarkan interpretasi Kitab Suoi yang subyektif belaka. Rupa-rupanya Yesus justru mau memperlihatkan bahwa yang penting bagi kita bukanlah apakah kita ini kaya, sehat dan bebas dari penjajahan, melainkan agar kita menyelamatkan jiwa kita (lihat misalnya: Luk. 12, 13-21; 13, 1-5).

b. Yesus mencintai kita

Namun dari kenyataan itu kita jangan menarik kesimpulan bahwa Yesus acuh-tak-acuh terhadap nasib manusia di dunia. Keselamatan yang dibawa Yesus adalah keselamatan manusia seutuhnya, dalam segala dimensi. Inti keselamatan itu adalah bahwa kita dicintai oleh Allah Bapak kita dan bahwa kita sendiri dapat mencintai Allah dan mencintai sesama. Cintakasih tak dapat melihat saudaranya menderita dan bersikap acuh-tak-acuh. Arti cinta itu kelihatan dalam ajaran dan sikap hidup Yesus.

1. Ajarannya: Inti sikap pengikut-pengikutnya diutarakan Yesus dalam perumpamaan tentang orang Samaria yang baik, yang merasa iba-kasih terhadap seseorang yang telah dianiaya dan dirampok, lalu membantu dan memeliharanya sampai sembuh kembali (Luk. 10, 25-37). Dan mengenai pengadilan terakhir Yesus mengatakan bahwa kita akan diadili menurut sikap kita terhadap sesama yang lapar, haus, telanjang, di penjara, yang membutuhkan bantuan. Dari situ Gereja Purba menarik kesimpulan bahwa perintah utama Yesus tentang sikap kita terhadap sesama adalah cintakasih (bdk. Rum 13, 8; 1Pe. 4,8 dll.). Sebagaimana diungkapkan dengan sangat bagus oleh Johannes: "Inilah berita yang telah kami dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengesih ... karena barangsiapa tidak mengesih saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengesih Allah yang tidak dilihatnya" (1 Jo 3, 11 dan 4, 20).

ii. Sikap hidupnya: Yesus tidak hanya bicara tentang cintakasih, sikap kehidupannya menyaksikan bahwa apa saja yang dilakukannya terdorong oleh cintakasih. Mereka yang bertemu dengan Yesus dapat merasakannya. Tanpa pamrih Yesus menawarkan keselamatan kepada semua orang. Berhadapan dengan orang yang sakit dan dibelenggu oleh roh-roh ia seakan-akan tidak dapat menahan kekuatannya: mereka menjadi sembuh. Tanda cinta Yesus yang paling meyakinkan adalah cara bagaimana ia menerima kematianNya: ia telah menyerahkan diri ketangan manusia dan waktu manusia mau membunuhNya ia tidak melawan, tidak menarik diri dan tidak membela diri, ia tidak menjadi pahit dan tidak membenci diri. Bagaimana seorang ibu yang tetap mencintainya anaknya walaupun anaknya mau membunuhnya, begitu Yesus mau berada di tangan kita sampai mati.

c. Gereja Purba

Sikap Yesus itu ternyata menjelma dalam diri mereka yang telah menerima Roh Yesus, dalam umat Gereja Purba. Sejak semula Gereja Purba menjadi peguyuban yang melihat tali persatuan dalam cintakasih. Tidak mengherankan bahwa mereka memberi perhatian khusus kepada saudara-saudara yang menderita: para janda, anak dan orang-orang miskin. Umat-umat yang kaya menyumbang bagi umat-umat yang berkekurangan, dan dalam surat-surat para rasul berulang-ulang cintakasih disebut sebagai perintah utama (Kis. 4, 32-37; 6, 1ss; 2 Ko. 8, 1ss; 1 Ko. 13; dll).

2. Sebuah refleksi

a. Dua arah cinta sejati

Dari uraian di atas jelaslah bahwa cinta tanpa pamrih terhadap sesama dan keterlibatan terhadap nasibnya adalah unsur hakiki dalam sikap injili. Apa yang terkandung dalam cinta kristiani ini akan kentara apabila kita memperhatikan dua arah pengungkapan setiap cinta sejati.

(i) Cinta sejati tidak tahan melihat orang yang dicintai menderita. Tanda cinta sejati ialah bahwa hati kita sendiri langsung menderita kalau orang yang kita cintai menderita. Kalau cinta kepada sesama adalah hakekat sikap kristiani dalam dunia, maka tanda adanya cinta itu ialah bahwa kita tidak tahan melihat sesama menderita. Ternyata dalam sikap Gereja selama dupuluh abad perhatian spontan terhadap mereka semua yang menderita amat menonjol, bahkan tidak dapat ditutup-tutupi oleh sekian banyak dosa melawan cinta, kekerasan, kekejaman, kebencian yang juga nampak dalam umat Kristus. Perhatian kepada orang yang menderita terutama nampak sebagai sikap spontan pada orang-orang suci. Maka jelaslah: kita sebagai orang Kristen tidak boleh dan bahkan, selama Roh Yesus berada dalam diri kita, tidak dapat bersikap acuh-tak-acuh terhadap sesama yang menderita.

(ii) Begitu pula cinta sejati tidak tahan melihat orang yang dicintai diperlakukan dengan tidak wajar, dengan tidak adil, dirampas haknya, ditipu, diperdaya, diperalat. Secara spontan kita merasakan bahwa perlakuan semacam itu tidak sesuai dengan martabat orang yang dicintai itu. Di sini kita sampai pada kaitan antara injil dan masalah ketidakadilan. Dalam semangat injil kita menaruh cinta pada sesama. Dan karena cinta itu tak mungkin kita membiarkan sesama kita ini diperlakukan dengan tidak adil. Dirumus begitu kiranya tak perlu suatu argumentasi yang rumit untuk menyadari bahwa tentu saja "pemajuan keadilan merupakan bagian integral pewartaan injil". (Paus Johannes Paulus II kepada para provinsi SJ tgl. 27-2-

1982). Sebagaimana dirumuskan oleh Sinode para Uskup di Roma 1971: "Cintakasih pertama-tama menuntut keadilan yang tak bersyarat, yaitu pengakuan terhadap martabat sesama manusia dan terhadap hak-haknya" (De iustitia in mundo nr. 35). Tak mungkin mencintai seseorang kecuali atas dasar perlakuan yang adil.

Maka jelas sekali bahwa pembongkaran ketidakadilan termasuk tugas hakiki orang kristiani dalam dunia. Perlawanan terhadap ketidakadilan adalah syarat pertama cintakasih kristiani.

b. Masalah struktur

Barangkali orang akan menjawab: memang kita harus berlaku adil; tetapi dalam injil tidak pernah dibicarakan hal perubahan-perubahan struktur dalam masyarakat. Namun hal itu tidak mengherankan. Yesus hanya menuntut agar kita mencintai sesama. Bagaimana cara mencintainya itu, apa implikasinya, tergantung dari situasi dan kondisi. Yang jelas, cinta sejati selalu efektif. Artinya tidak puas dengan kata-kata dan perasaan-perasaan baik hati, melainkan mau sungguh-sungguh membantu mereka yang menderita, mau sungguh-sungguh membebaskan mereka yang diperlakukan dengan tidak adil. Seperti kalau kita melihat orang jatuh ke dalam sungai dan mau tenggelam dan kita dapat berenang, maka kalau kita betul-betul mempunyai perhatian terhadapnya, apalagi kalau kita sungguh-sungguh mencintainya, kita tentu akan terjun juga dan menyelamatkannya.

Jadi kalau kita betul-betul tak tahan dengan ketidakadilan, tentu kita tidak puas dengan perasaan-perasaan yang murah melainkan merasa terdorong untuk secara nyata membebaskan dia dari ketidakadilan itu.

Nah, baru dengan industrialisasi manusia mulai menyadari bahwa penderitaan, kemiskinan dan ketidakadilan di dunia bukan hanya akibat kekurangan alamiah atau kehendak jahat beberapa individu, melainkan tertanam dalam struktur-struktur proses-proses ekonomis, sosial, politis dan budaya, dan bahwa struktur-struktur itu bukan sesuatu yang alamiah, melainkan dapat berubah dan dapat kita ubah. Pada jaman Yesus misalnya dilihat dengan jelas bahwa tuan rumah harus diperlakukan para budaknya sebagai manusia, bahkan sebagai saudara dalam Kristus, tetapi bahwa sistem perbudakan itu sendiri jahat tidak disadari. Sistem itu dianggap biasa, dikira selalu ada dan di semua bangsa. Baru ratusan tahun kemudian sistem perbudakan itu sendiri dilihat sebagai tidak wajar dan dihapus. Oleh karena itu tuntutan untuk mengubah struktur-struktur yang tidak adil baru dapat bermula di jaman modern, di mana disadari bahwa struktur-struktur yang memperkokoh hubungan yang tidak adil memang dapat kita ubah. Dan oleh karena itu kita sekarang menyadari bahwa cintakasih menuntut agar struktur-struktur ketidakadilan dibongkar.

c. Injil membawa kebebasan

Sampai sekarang kita hanya bicara tentang implikasi normatif injil. Tetapi injil tidak hanya memberitahukan bahwa kita harus mengusahakan keadilan, injil juga memberi kekuatan agar kita mengusahakannya. Injil Yesus Kristus membebaskan kita.

Teks kunci terdapat dalam injil Lukas. Kedatangan Yesus ke Nazaret oleh Lukna dipergunakan sebagai judul dan ringkasan maksud kegiatan Yesus di Israel. Tindakan dan kata-katanya di Nazaret bersifat programatis. Yesus membaokan nas dari kitab nabi Yesaya sbb.: "Roh Tuhan ada padaKu, oleh sebab Ia telah mengurapi Aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin; dan Ia telah mengutus Aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang". Kemudian Yesus mengatakan: "Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya" (Luk. 4, 18s., 21; nas-nas searah terdapat juga pada Luk. 1, 50-54; 5, 21-26).

Yesus dalam teks ini menghayati diri sebagai pembebas. Apa arti pembebasan itu dapat kita lihat dalam kisah tentang Zakheus (Luk. 19, 1-10). Zakheus, si pemungut cukai yang penghisap masyarakat, karena bertemu dengan Yesus berubah dari dalam: ia menjadi bebas dari keterikatan pada dirinya sendiri. Ia dapat melakukan apa yang belum pernah dapat dilakukannya: membagi kekayaannya dengan orang miskin dan bertindak dengan jujur dan adil dalam suatu pekerjaan yang mudah menggoda untuk menyeleweng.

Contoh ini memperlihatkan bahwa Yesus membebaskan kita dari kecemasan akan diri kita sendiri, dari nafsu untuk memiliki, dan dari rasa benci. Contoh kebebasan yang paling mengesankan adalah Yesus sendiri dalam kematiannya: Ia tetap setia pada panggilanNya: menyerahkan diri tanpa pamrih ke tangan manusia, menjadi saudara kita, bahkan dalam situasi di mana kita akan membunuh saudara kita ini (seperti Kain membunuh Abel). Ia bersedia dibawa ketempat pembunuhan tanpa melawan, rasa takut tidak membelengunya, tanpa menjadi pahit, tanpa membenci. Maka kalau kita mengikuti Yesus kita ikut dibebaskan juga.

Baru orang yang bebas dari kecemasan akan dirinya, dari nafsu mau memiliki dan dari rasa benci adalah bebas untuk berdiri di samping saudara yang menderita, tanpa reserve. Kebebasan yang kita terima dari Yesus membebaskan kita untuk berfihak betul-betul pada mereka yang menderita, yang miskin, yang dihisap, yang ditindas, untuk tidak membiarkan saudara diperlakukan dengan tidak adil.

Oleh karena itu injil adalah suatu kabar yang membebaskan: dibebaskan oleh cintakasih Yesus Kristus, kita tidak lagi menuntut yang ini dan itu bagi kita dan oleh karena itu kita bebas untuk berdiri bersama mereka yang menderita, mereka yang diperlakukan dengan tidak adil, untuk bersama mereka berusaha agar mereka dapat bebas dari penderitaan dan ketidakadilan. Itulah pengalaman yang mendasari teologi pembebasan yang muncul di Amerika Latin sebagai refleksi teologis atas pengalaman umat-umat orang kecil yang mendengarkan injil tentang Yesus Kristus.

d. Menghilangkan salib?

Dalam suatu pertemuan seorang Pater pernah bertanya: "Bukankah menghilangkan penderitaan dan ketidakadilan berarti mau menghilangkan salib? Padahal keselamatan kita justru terletak dalam mengikuti Yesus dan memanggul salib kita! Membebaskan manusia dari salib apakah tidak bertentangan dengan hakekat iman?".

Pertanyaan ini berdasarkan suatu salah faham. Kita sendiri memang hanya dapat dekat dengan Yesus apabila kita bersedia untuk memanggul salib yang dikirim Yesus, entah apa bentuknya. Yesus justru membebaskan kita untuk menjadi kuat untuk membawa salib kita mengikuti Yesus. Dan kita boleh membantu orang/menderita - karena sakit, kehilangan orang yang dicintai, dikecewakan, menderita perlakuan tidak adil - untuk melihat salib Yesus dalam penderitaannya dan untuk menerimanya. Itu bukan suatu rasionalisasi melainkan suatu pengalaman yang mendalam, yaitu pengalaman pertemuan sungguh-sungguh dengan Yesus.

Tetapi kesediaan untuk menerima salib sama sekali tidak berarti bahwa kita bertugas untuk meletakkan salib di bahu orang lain, atau bahwa kita membiarkan saja orang lain menderita. Cintakasih Yesus sebaliknya akan mendorong kita untuk melakukan segala-galanya untuk mengurangi penderitaan dan ketidakadilan di dunia ini. Membagi salib dan membiarkan manusia memanggul salibnya adalah hak eksklusif Yesus Kristus sendiri dan terjadi dalam dialog dengan yang bersangkutan. Dari kita diharapkan untuk berusaha sekuat tenaga agar setiap orang dapat merasa gembira, bebas dari penderitaan dan ketidakadilan, dapat mencicipi kebahagiaan.

Jadi kita tidak menolak untuk membawa salib yang diberikan kepada kita, tetapi kita merana dipanggil untuk berusaha agar segala bentuk penderitaan dapat dikurangi.

e. Kesimpulan

Kiranya sudah jelas bahwa injil menuntut dari kita untuk menentang segala bentuk ketidakadilan. Seperti dikatakan dalam sinode para uskup 1971 (art. 6): "Bagi kami perjuangan demi keadilan dan partisipasi dalam perubahan dunia merupakan bagian hakiki pewartaan kabar gembira, artinya perutusan Gereja untuk menebus umat manusia dan untuk membebaskannya dari segala bentuk penindasan". Injil membebaskan kita untuk dapat mengusahakan kendilan. Dan oleh karena itu Gereja memang bertugas untuk memperjuangkan suatu tatanan suatu masyarakat yang adil.

Dengan demikian ditolak dua faham tentang pewartaan injil yang ekstrem: Faham pertama mempunyai tiga ciri: (1) individualisme keselamatan: tugas Gereja adalah keselamatan masing-masing orang secara individual saja, tatasusunan masyarakat bukan urusannya; (2) spiritualisme: Gereja hanya berurusan dengan keselamatan jiwa, bukan dengan masalah seperti me-

Bab III: Wewenang Gereja di bidang pengaturan masyarakat

1. Yang menjadi masalah

Antara ajaran sosial Gereja (ASG) dan ajaran Gereja lain-lain terdapat suatu perbedaan yang menyolok. Ajaran Gereja mengenai iman kepercayaan menyangkut hubungan antara manusia dengan Tuhan dan jelas termasuk inti wewenang pengajaran Gereja. Begitu pula ajaran moral bicara tentang bagaimana manusia harus hidup sebagai anak Allah. Tetapi ASG bicara tentang bagaimana kehidupan sosial, ekonomis, politis dan kultural masyarakat harus disusun. Gereja tidak hanya mengemukakan tuntutan-tuntutan moral dasar seperti agar masyarakat hendaknya diatur dengan adil atau supaya manusia solidier satu sama yang lain. Melainkan Gereja secara kongkrit mencela bentuk-bentuk tatanan masyarakat dan menganjurkan tindakan-tindakan tertentu. Tetapi apakah Gereja dan teologi berwenang untuk mengatakan sesuatu mengenai masalah-masalah sosial, ekonomis, kultural atau politis? Apakah yang dapat merupakan dasar wewenang Gereja dalam bidang-bidang itu?

2. Dua sumber wewenang ASG

Untuk menjawab pertanyaan itu perlu kita perhatikan bahwa ASG terbentuk dari dua unsur: dari norma-norma etis dan kristiani yang mendasarinya dan pengetrapan norma-norma itu terhadap situasi sosial-ekonomis-politis dan kultural masyarakat. Oleh karena itu ASG berdasarkan dua sumber.

Norma-norma fundamental bagi pengaturan masyarakat bersumber pada gambaran manusia yang termuat dalam injil. Inti gambaran manusia injil ialah bahwa manusia adalah citra Allah, anak tercinta Bapak di surga yang telah mengutus PuteraNya Yesus Kristus agar menjadi salah satu dari antara kita dan membuka jalan keselamatan. Maka ASG berdasarkan keyakinan iman, bahwa setiap orang mempunyai martabat yang tak terhingga yang terungkap dalam hak-hak dasarnya sebagai manusia, sama derajatnya satu sama yang lain, oleh karena itu harus diperlakukan dengan adil, bahwa harta benda duniawi harus secara adil dibagi antara semua orang agar mereka dapat hidup sesuai dengan martabat mereka.

Tetapi bagaimana masyarakat secara kongkrit harus terwujud agar manusia diperlakukan menurut tuntutan injil itu, bagaimana pembentukan hubungan kerja, cara mengorganisasikan produksi industrial, penataan pemanfaatan tanah sebagai dasar produksi pertanian, susunan politik mana yang paling tepat dst. Banyak dapat dipelajari melalui penelitian terhadap masyarakat, jadi dari analisa-analisa ilmu-ilmu sosial yang bersangkutan. Jadi gereja membutuhkan ilmu-ilmu sosial. Injil tidak bicara tentang hukum-hukum kehidupan masyarakat seperti tidak juga mengenai hukum-hukum alam. Gereja tidak mempunyai pandangan dari dirinya sendiri mengenai bagaimana seharusnya susunan masyarakat secara kongkrit (dan dalam ini bertolak belakang dengan faham agama Islam yang selalu menegaskan bahwa dalam al Quran segala pengetahuan tentang dunia dan masyarakat sudah termuat; menurut kepercayaan kristiani Allah tidak mewahyukan sesuatu tentang dunia - untuk itu Allah memberikan akal budi kepada manusia - melainkan tentang Dirinya sendiri).

3. Tidak bersifat mutlak

Jadi ajaran sosial Gereja tidak langsung diperoleh dari wahyu, melainkan merupakan hasil pengetrapan prinsip-prinsip dasar kemanusiaan kristiani (prinsip-prinsip moral kristiani) pada bidang kehidupan masyarakat dalam dimensi sosial, ekonomis, politis dan budaya dengan memperhatikan hasil-hasil ilmu-ilmu sosial. Oleh karena itu ASG tidak bersifat mutlak. ASG bukan sesuatu yang selalu sudah sempurna, dan oleh karena itu harus terus menerus dikembangkan dalam memperhatikan perkembangan-perkembangan dalam masyarakat, pengalaman umat dan kemajuan ilmu-ilmu sosial.

Oleh karena itu argumentasi Gereja dalam ajaran sosialnya tidak dapat diambil langsung dari Kitab Suci dan iman kepercayaan. Karena ASG

itu mengenai susunan masyarakat di dunia, Gereja harus mengemukakan suatu argumentasi yang dapat difahami juga oleh orang-orang di luar Gereja. Oleh karena itu argumentasi yang dikemukakan oleh Gereja dalam ajaran sosialnya untuk sebagian besar bersifat etis-filosofis, artinya berdasarkan pengetahuan ilmiah tentang masalah-masalah kemasyarakatan dan akal budi. Maka Gereja juga dapat dikritik dan harus menanggapi kritik itu. Itulah sebabnya Gereja merasa memerlukan ahli-ahli di bidang ilmu-ilmu sosial dan etika kemasyarakatan. Sebagai kesimpulan dapat dikatakan bahwa ASG tidak bersifat mutlak, melainkan senantiasa harus diperbaiki dan dikembangkan.

4. Dari pendekatan guru ke pendekatan nabi

Apabila kita meninjau perkembangan ajaran para Paus dan Konsili Vatikan II tentang masalah-masalah sosial maka kita melihat suatu pergeseran. Ensiklik-ensiklik pertama masih berusaha untuk memberi semacam ajaran lengkap tentang bagaimana masyarakat industri harus ditatar. Namun sejak tahun 60-an abad ini nada Gereja berubah. Gereja tidak lagi seakan-akan mau menyaingi pelbagai ideologi dengan mengajukan teorinya sendiri tentang bagaimana masyarakat harus disusun, semacam ajaran komplet yang tinggal dilaksanakan. Melainkan Gereja semakin melihat tugasnya dalam mengajukan dengan tegas prinsip-prinsip dasar kehidupan bersama manusia seperti keadilan, hormat terhadap hak asasi dan kebebasan setiap orang manusia, solidaritas antar sesama golongan, prioritas pekerjaan terhadap modal dst. serta, berdasarkan prinsip-prinsip itu mengkritik situasi kongkrit atau menuntut perubahan-perubahan tertentu yang sudah amat mendesak. Sikap terakhir ini diungkapkan berulang-ulang oleh Paus Johannes Paulus II: Gereja "tidak datang dengan pemecahan-pemecahan teknis atau material" (tgl. 5 Maret 1983 di depan para "campesinos" di Panama). "Tetapi Gereja menganggap sebagai tugasnya untuk terus menerus menunjuk pada martabat dan hak-hak manusia pekerja dan untuk mencela keadaan-keadaan di mana martabat dan hak-hak itu dilanggar, dan juga untuk ikut menyumbang untuk memberi arah kepada perubahan-perubahan sedemikian rupa sehingga menghasilkan kemajuan sejati bagi manusia dan masyarakat" (Laborem Exercens nr. 1). Dari pendekatan pola guru (magistra) Gereja beralih ke pendekatan pola nabi (propheta).

Perbedaan antara kedua pendekatan itu dapat dirumuskan sebagai berikut: Seorang guru menyampaikan suatu pengetahuan tertentu kepada muridnya. Guru memberi, murid menerima. Sekaligus ajaran yang disampaikan bersifat teoretis dan umum. Sedangkan seorang nabi mengajukan tuntutan Allah kepada manusia dalam situasi tertentu. Ia belum tentu mempunyai pengetahuan umum yang lebih luas daripada para pendengarnya. Kelebihanannya ialah bahwa ia, penuh Roh Kudus, memahami kehendak Allah dalam situasi kongkrit. Maka atas nama Allah ia mengajukan kritik atau tuntutan terhadap sikap, tindakan atau bentuk hubungan antar manusia.

Pergeseran dari pendekatan guru ke pendekatan nabi dalam ASG itu tepat. Di satu pihak Gereja tidak mempunyai sumber pengetahuan tersendiri tentang bagaimana masyarakat harus disusun. Di lain pihak, karena Gereja itu dianugerahi Roh Kudus, Gereja sanggup dan wajib untuk menilai, menuntut, mencela, mengkritik. Dalam terang Roh Kudus Gereja menyadari di mana dalam masyarakat prinsip-prinsip dasar kehidupan bersama dilanggar dan menyuarakannya. Pendekatan itu membawa resiko: Suatu ajaran teoretis umum tidak terlalu menganggu fihak-fihak yang berkuasa, tetapi setiap kritik, penilaian dan tuntutan mesti membawa Gereja ke dalam konflik dengan kekuatan-kekuatan yang bertanggungjawab atas pelanggaran terhadap prinsip hidup bersama yang sesuai dengan martabat manusia itu.

5. Ajaran Sosial Gereja mengenai apa?

Bagaimana Gereja menentukan masalah apa dari keseluruhan permasalahan kehidupan masyarakat yang menuntut pengajarannya? Dalam penentuan itu nampak sifat kenabian Gereja. Gereja bicara apabila suara hatinya, yaitu Roh Kudus, mendesak. Apabila suatu ketidakadilan, penderitaan, pelanggaran martabat manusia, suatu penyelewengan dari prinsip-prinsip dasar kehidupan bersama sudah keterlaluan maka Gereja tergugah untuk bicara.

Jadi maksud Gereja bukan untuk menambahkan sesuatu pada khazanah pengertian sosial umat manusia (walaupun ASG, dilihat sebagai sumbangan kepada ilmu-ilmu sosial, bermutu tinggi pula: ensiklik-ensiklik ditulis dengan bantuan ilmuwan ahli dan sudah membuktikan relevansinya dalam mengambil sikap terhadap perkembangan-perkembangan sosial) melainkan karena merasa terganggu untuk menyuarakan kabar gembira kebebasan injil ke dalam suatu situasi yang pada hakekatnya ditandai oleh dosa. Jadi ASG ditentukan oleh pengalaman penderitaan manusia, oleh tantangan-tantangan yang ada. Jadi Gereja harus peka. Suatu Gereja yang tidak peka terhadap penderitaan dan ketidakadilan tentu tidak lagi setia pada perutusan Kristus dan tidak mungkin muncul sebagai nabi. ASG selalu erat hubungannya dengan tantangan sosial yang sedang terasa dalam masyarakat. ASG selalu berkaitan dengan konteks suatu masyarakat dan jaman tertentu. Begitu misalnya 100 tahun lalu Gereja terganggu oleh masalah kaum buruh dalam masyarakat-masyarakat industri. Oleh karena itu Gereja terjun ke bidang itu. Sekarang, seratus tahun kemudian, masalah kemiskinan dan eksploitasi di negara-negara berkembang menjadi tantangan bagi suara hati sosial Gereja hal mana nampak jelas dalam ASG sejak Mater et Magistère (1959).

6. Proses pembentukan Ajaran Sosial Gereja

Bagaimana proses pembentukan ajaran sosial Gereja? Dalam ini perlu diperhatikan dua hal: (1) ASG tidak hanya terdiri dari ajaran para Paus. (2) Ajaran para Paus sendiri adalah hasil penggodogan banyak masukan.

(1) ASG tidak hanya terdiri dari ajaran para Paus, melainkan termasuk juga ajaran dan pikiran para uskup, teolog dan kaum awam. Masing-masing dengan fungsi dan bobot yang berbeda. Ajaran Gereja yang paling resmi, juga di bidang sosial, adalah ajaran Konsili-Konsili dan ajaran yang secara resmi diajukan oleh Paus. Walaupun ajaran sosial tidak bersifat "tak-dapat-sesat" namun itulah ajaran resmi Gereja (ttg. kewajiban orang Katolik terhadap ajaran semacam itu lihat Lumen Gentium nr.25). Tubuh seluruh ajaran sosial Gereja Katolik juga termuat pidato dan khotbah Paus, pernyataan para uskup, teolog, dan awam. Tidak mungkin untuk menarik batas tajam antara apa yang sudah ikut membentuk ASG dan apa yang merupakan pendapat pribadi seseorang yang kebetulan Katolik. Sebagai garis besar dapat dikatakan bahwa seseorang sekurang-kurangnya harus mengajukan pendapatnya sebagai orang Katolik, jadi atas dasar tanggungjawab iman katoliknya, baru termasuk faham Katolik tentang masalah sosial.

(2) Ajaran sosial para Paus sendiri adalah hasil penggodogan banyak masukan. Sebelum Paus merasa perlu untuk merumuskan ajaran Gereja, tentu sudah ada pengalaman orang katolik dalam masyarakat, ada awam dan rohaniwan yang menyadari adanya masalah sosial. Ada faham-faham, harapan-harapan dan sikap-sikap yang sedang terbentuk tentang masalah itu dalam Gereja. Para teolog merefleksikannya. Barangkali ada kontroversi. Akhirnya Paus sendiri akan bicara, dan dalam merumuskan ajarannya Paus pasti akan berkonsultasi dengan para ahli.

Jadi ajaran sosial Gereja harus tumbuh dari bawah dan dari atas. Harus berdasarkan pengalaman, refleksi dalam cahaya iman dan pengolahan oleh para ahli ilmu-ilmu sosial, psikologi, etika, antropologi dst. Justru karena ajaran sosial tidak langsung berdasarkan wahyu melainkan berdasarkan fakta-fakta empiris, penghayatan dan perasaan masyarakat dan evaluasi para ahli pimpinan Gereja dalam perumusannya harus mendengarkan suara-suara dalam masyarakat, terutama dalam masyarakat Katolik.

7. Dua contoh perkembangan teori dari bawah

a. Imam buruh

Sesudah perang dunia II ada imam-imam di Perancis yang menjadi buruh kasar. Maksud mereka ialah untuk menghadirkan Gereja kembali di kalangan kaum buruh yang sudah terasing daripadanya. Melalui imam-imam itu Gereja mulai menyadari bahwa Gereja harus datang kepada kaum buruh dan jangan hanya menunggu mereka. Baru dengan berada ditengah-tengah kaum buruh Gereja dapat mulai menahami masalah-masalah mereka. Pada tahun 1952 sudah

ada k.l. 100 "imam buruh" di Perancis. Namun pimpinan Gereja di Roma bersikap semakin dingin. Yang dilihat hanya masalah-masalah: Bahaya keterlibatan dalam urusan-urusan politik, keanggotaan dalam Serikat Buruh Komunis, ketidakcocokan kehidupan mereka dengan apa yang dianggap cara hidup seorang imam: ikut dalam pelayanan sakramen di sebuah paroki, berdoa brovir. Mulai dengan tahun 1951 gerakan ini dibatasi dan 1959 sama sekali dihentikan oleh Paus Johannes XXIII. Tetapi Konseili Vatikan mengambil sikap yang positif dan Paus Paulus VI mencabut larangan.

b. Teologi Pembebasan

Teologi pembebasan berkembang di Amerika Latin dalam tahun 60-an dan 70-an. Inti teologi itu adalah faham dan pengalaman iman sebagai pembebasan. Tidak ada satu teologi pembebasan resmi, melainkan banyak aliran yang cukup berbeda satu sama lain. Ada yang lebih "populis-sosial" (menegaskan kedekatan dengan rakyat), adalah yang lebih marxis (perjuangan kelas) dan ada yang lebih injili. Namun aliran-aliran ini semua mempunyai inspirasi dasar yang sama dan yang membedakan mereka dari teologi-teologi yang lebih tradisional. Ciri khas teologi-teologi pembebasan dapat dirumuskan dalam tiga butir. (1) Iman injili diartikan dan dialami sebagai pembebasan manusia seluruhnya. Pembebasan itu sekaligus merupakan pembebasan politik-sosial kelas-kelas dan bangsa-bangsa yang tertindas, pembebasan manusia sebagai proses dalam sejarah yang menuju ke emansipasi yang semakin besar dalam suatu revolusi kebudayaan permanen, dan pembebasan dari dosa sebagai penebusan oleh Yesus Kristus. (2) Teologi pembebasan mengembangkan "programnya" bukan dari refleksi teoretis-teologis, melainkan dari kebersamaan rakyat Amerika Latin dalam pengalaman ketidakadilan. Jadi teologi pembebasan bukan suatu teori yang tinggal dipraktikkan, melainkan justru merupakan hasil refleksi atas pengalaman penindasan dan praktek pembebasan. Refleksi atas dasar praktek itu membutuhkan masukan dari ilmu-ilmu sosial. Dari ilmu-ilmu sosial terutama diambil oper faham tentang keterbelakangan dan kemiskinan sebagai akibat dominasi kapitalisme internasional (teori ketergantungan). (3) Teologi pembebasan terang-terangan berfihak pada dan berkembang dari kebersamaan dengan rakyat kecil, miskin dan tertindas. Oleh karena itu teologi pembebasan merupakan aksi pembebasan rakyat tertindas dalam segala dimensi. Dapat ditambah bahwa teologi pembebasan hanya dapat dimengerti pada latar belakang suatu masyarakat yang untuk sebagian terbesar beragama Katolik, di mana baik rakyat tertindas maupun para penindas bersama-sama pergi ke gereja, di mana hirarki Gereja berabad-abad lamanya mendukung struktur-struktur kekuasaan yang eksploitatif, sehingga pengalaman iman sebagai pembebasan merupakan suatu pembaharuan mendalam terhadap seluruh Gereja. Kiranya tidak mungkin untuk begitu saja "mengetrapkan" teologi pembebasan di tempat lain, karena teologi itu tak terpisahkan dari pengalaman dan perjuangan umat yang melahirkannya.

Teologi pembebasan sudah membuktikan diri sebagai tantangan yang semakin kuat terhadap sistem-sistem penindas di negara-negara Amerika Latin. Namun perlu juga dilihat bahaya pragmatisme revolusioner dan ideologisasi, terutama pengambilan oper terhadap Marxisme secara kurang kritis. Namun ternyata teologi pembebasan sudah berhasil untuk menggugah Gereja Amerika Latin sebagai keseluruhan untuk menyadari bahwa kemiskinan, keterbelakangan dan ketidakadilan akibat struktur-struktur kekuasaan merupakan tantangan pastoral terbesar bagi Gereja di Amerika Latin. Sikap "Roma" masih menudua. Di satu fihak diakui bahwa pemajuan keadilan termasuk panggilan Gereja, di lain fihak ada kekhawatiran bahwa teologi itu terpengaruh oleh pelbagai ideologi. Dalam ini teologi pembebasan hanya menjadi contoh bagi kenyataan bahwa antara keterlibatan sosial di basis dan pimpinan Gereja sering muncul ketegangan-ketegangan.

8. Alamat Ajaran Sosial Gereja

Ensiklik-ensiklik sosial pertama belum membataskan dengan jelas fihak mana yang menjadi alamatnya. Kita dapat memperoleh kesan bahwa para Paus mengharapkan agar semua orang di dunia diharapkan menjalankan ajaran Katolik. Namun sejak Konsili Vatikan II ("*Gaudium et Spes*") dikemukakan jelas bahwa Gereja tidak mau memaksakan ajarannya kepada fihak-fihak luar. Alamat langsung ASG adalah umat Katolik. Kepada umat manusia bukan

Katolik Gereja menawarkan ajarannya sebagai sumbangannya dalam usaha bersama untuk mewujudkan kehidupan bersama masyarakat yang lebih sesuai dengan martabat manusia.

Bab IV: Perkembangan Ajaran Sosial Gereja Katolik

Sesudah membicarakan dasar teologis ASG dan wewenang Gereja dalam bidang pengaturan masyarakat, maka dalam bab ini diutarakan garis besar perkembangan ASG itu. Pertama, akan diperlihatkan bahwa kesadaran sosial Gereja berkembang dalam tiga tahap. Kedua, diuraikan dokumen-dokumen utama ASG secara sangat singkat. Ketiga, kami akan menunjukkan arah perkembangan kesadaran sosial Gereja yang nampak dalam dokumen-dokumen itu.

1. Tiga tahap perkembangan kesadaran sosial Gereja

Gereja selalu menyadari panggilannya untuk mewartakan keselamatan Allah kepada manusia. Namun implikasi-implikasi perutusan itu dalam bidang kehidupan masyarakat tidak sejak semula disadari dengan jelas. Kita dapat membedakan tiga tahap perkembangan kesadaran sosial Gereja.

(1) Tahap karitatif

Sejak semula Gereja memperhatikan para yatim piatu dan janda, kaum miskin dan orang asing. Dalam sesana yang menderita Gereja melihat wajah Kristus. Ciri khas pendekatan karitatif (dari "caritas" = kasih-sayang) ialah keterbukaan hati terhadap segala penderitaan. Orang yang kelihatan menderita ditolong. Sejak abad pertengahan kaum biarawab dan biarawati membuka rumah-sakit-rumah-sakit pertama di dunia, didirikan rumah penginapan bagi kaum pejiarah. Para tawanan dalam penjara dikunjungi dan dibantu. Orang yang luka dalam perang dipelihara.

(2) Tahap normatif sektoral

Industrialisasi yang mulai kurang lebih 200 tahun yang lalu menghadapkan Gereja pada masalah yang baru. Buruh-buruh industri terpaksa bekerja 16 jam per hari dengan upah yang sangat sedikit dan tanpa jaminan sosial serta hak-hak apa-apa. Penderitaan buruh-buruh itu bukan karena bencana alam atau kemiskinan seluruh masyarakat, melainkan jelas-jelas disebabkan oleh manusia: dalam sistem produksi kapitalis tenaga kerja buruh diperlakukan sebagai faktor produksi saja menurut hukum pasar bebas. Nampaklah bahwa masalah kaum buruh adalah masalah keadilan.

Berhadapan dengan situasi sosial yang baru itu Gereja menyadari bahwa penanggulangan melalui derma, depur umum dan cara-cara karitatif lain tidak mencukupi. Struktur hubungan antara para pemilik modal dan kaum buruh sendiri harus dirobah. Dalam ini Gereja juga ditantang oleh munculnya sosialisme, terutama Marxisme, yang memiliki suatu teori yang ampuh dan menawarkan perjuangan kelas dan revolusi sebagai alat untuk mengubah hubungan kerja yang tidak adil itu.

Situasi itulah yang melahirkan ajaran sosial Gereja Katolik. Dokumen pertama adalah "Rerum Novarum" Paus Leo XIII tahun 1891, disusul oleh "Quadragesimo Anno" 1931 oleh Pius XI, dan beberapa pernyataan lain. Bersama dengan itu para teolog dan ahli ilmu-ilmu sosial yang katolik semakin memperhatikan masalah sosial.

Tahap ini yang dapat kita tempatkan antara 1848 (khotbah-khotbah sosial pertama Uskup von Ketteler dari Mainz) dan 1961 ("Mater et Magistra") dapat disebut normatif atau teoretis karena menekankan ajaran mengenai bagaimana seharusnya hubungan sosial dalam proses produksi ditata. Pendekatan masih bersifat sektoral karena terbatas pada satu sektor bidang permasalahan, yaitu "masalah sosial", masalah kaum buruh industri di negara-negara industri asli.

(3) Tahap politis global

Dengan eniklik "Mater et Magistra" karangan Johannes XXIII pada tahun 1961 mulai nampak suatu penggeseran. Pusat perhatian mulai pindah dari "masalah sosial klasik" di negara industri (yang untuk sebagian sudah

diatasi) ke masalah negara-negara berkembang; keterbelakangan mereka dengan masalah kemelaratan dan kelaparan, perbedaan antara kaya miskin, ketidakadilan dalam hubungan ekonomis antara "utara" dan "selatan". Masalah kaum tani pun mendapat perhatian. Perspektif Gereja menjadi global.

Sekaligus mulai disadari bahwa tidak cukuplah kalau Gereja memberi ajaran normatif secara teoretis saja. Terutama pengalaman Gereja di Amerika Latin menunjukkan bahwa ketidakadilan sosial bukan sekedar akibat suatu salah faham teoretis sehingga asal dikemukakan pengertian yang betul, ketidakadilan akan berkurang, melainkan ketidakadilan berakar dalam struktur-struktur kekuasaan masyarakat yang bersangkutan. Maka mengusahakan keadilan menuntut suatu tindakan yang praktis atau politis, yaitu usaha untuk mengubah struktur-struktur kekuasaan yang tak adil itu. Gereja semakin menyadari bahwa orang-orangnya harus terjun ke dalam masyarakat, harus berdiri di samping mereka yang tertindas. Dengan sendirinya terbuka kemungkinan bahwa Gereja ditarik ke dalam konflik dengan kekuasaan-kekuasaan yang merasa terancam oleh keterlibatan Gereja dalam perombakan struktur-struktur yang tidak adil.

Pengajaran Gereja dalam tahap ketiga semakin bersifat profetis: tidak diberi uraian lengkap teoretis, melainkan tuntutan-tuntutan injil disuarakan sebagai kritik kongkrit terhadap ketidakadilan dan sebagai tuntutan agar perubahan-perubahan nyata diadakan. Sejak itu Gereja dituntut terlalu melibatkan diri dalam masalah-masalah sosial-ekonomis-politik dan "kurang seimbang" karena memang memilih untuk berfiyah pada mereka yang tertindas, berhadapan dengan para penindas.

Perlu diperhatikan bahwa perkembangan itu tidak berarti bahwa tahap-tahap sebelumnya sudah tidak pada tempatnya lagi. Pendekatan karitatif individual, jadi bantuan langsung kepada seseorang atau keluarga atau kelompok yang menderita tetap perlu. Begitu pula ajaran teoretis normatif diperlukan untuk mencegah bahwa keterlibatan Gereja merosot menjadi aktivisme sosial belaka. Hanya dua tahap itu belum mencukupi.

2. Ringkasan isi dokumen Ajaran Sosial Gereja terpenting

(1) Leo XIII: RERUM NOVARUM (1891)

Ensiklik perintis ASG ini belum seluruhnya memuaskan, namun menempatkan Gereja dengan tegas dalam keterlibatan terhadap kaum buruh dan memuat prinsip-prinsip hubungan sosial yang penting.

Ensiklik ini belum menyajikan analisa masyarakat kapitalis mendalam dan belum ada ajaran tentang pekerjaan. Paus bicara seakan-akan seluruh masyarakat terdiri dari umat Katolik; problematika pluralisme agama dan ideologi belum diperhatikan. Pembelaan terhadap hak milik pribadi dan kritik terhadap sosialisme nampaknya berlebihan. Namun apa yang sebenarnya ditolak adalah sosialisme ekstrim yang sekarang terwujud dalam komunisme. Paus mengutuk liberalisme individualis, begitu pula penentuan upah menurut hukum pasar. Walaupun pemogokan dinilai jelek, namun sebagai senjata terakhir kaum buruh hak untuk mogok diakui pula. Yang amat penting adalah ajaran tentang "upah keluarga". Siapa yang bekerja penuh, berhak untuk mendapat upah yang mencukupi agar ia bersama keluarganya dapat hidup dengan wajar.

Ada dua ajaran fundamental yang secara definitif menyelesaikan suatu perselisihan di kalangan katolik sendiri. Pertama, melawan liberalisme yang menolak campur tangan negara dalam hubungan sosial-ekonomis, Paus menulis bahwa negara berkewajiban berat untuk melindungi kaum buruh dan demi tujuan itu berhak untuk ikut menata bidang itu. Kedua, Paus membenarkan hak kaum buruh untuk membentuk serikat-serikat guna membela diri. Masih ada satu hal yang penting. Dalam ensiklik ini Paus menggarisbawahi hak Gereja untuk membuka suara dalam bidang sosial-ekonomis. Jadi "Rerum Novarum" sekaligus merupakan penolakan terhadap pendapat bahwa perutusan Gereja dibatasi pada bidang "sakral".

(2) Pius XI: QUADRAGESIMO ANNO (1931)

Ensiklik yang memperingati 40 tahun "Rerum Novarum" ini memberi uraian yang sistematis dan mendalam tentang masyarakat industri modern. Ada dua ajaran yang menjadi alasan salah faham: (1) Seakan-akan Gereja mengajukan suatu sistem pengaturan masyarakat berdasarkan perwakilan semua

golongan karya ("corporative state"); namun yang sebenarnya mau dikemukakan ialah bahwa antara masyarakat yang terdiri dari kelas-kelas yang saling berlawanan, dan impian komunisme mengenai masyarakat tanpa kelas masih ada kemungkinan lain: masyarakat di mana semua golongan bekerja sama sesuai dengan fungsi mereka. (2) Sosialisme tetap dikutuk. Tetapi perlu diperhatikan bahwa yang dikutuk bukan setiap aliran yang menamakan diri sosialis melainkan hanya gerakan-gerakan yang memenuhi definisi "sosialisme" ensiklik itu, jadi aliran-aliran yang bersifat kolektivistik dan materialistik.

Dari kekayaan ensiklik ini di sini disebut hanya tiga pokok saja. Pertama, ajaran tentang hak milik pribadi. Hak milik mempunyai fungsi sosial yang tidak boleh digagalkan oleh fungsi individual, yaitu bahwa semua harta benda material diperuntukkan bagi seluruh umat manusia dan baru kemudian bagi pemilik individual. Ajaran ini kemudian diulang kembali oleh Pius XII dalam PESAN PENTEKOSTA 1941. Maka negara berhak untuk mengatur hak milik sesuai dengan kepentingan hidup sosial-ekonomis masyarakat. Hak milik tidak hanya diciptakan oleh modal mati, melainkan juga oleh modal hidup, pekerjaan buruh. Jadi buruh pun berhak atas hasil produksi. Untuk pertama kali diusulkan agar hak milik produktif dibentuk juga dalam tangan kaum buruh.

Kedua, Paus dengan jelas melihat bahwa masyarakat kapitalis bukan suatu keluarga besar yang harmonis melainkan terdiri dari kelas-kelas dengan kepentingan-kepentingan yang berlawanan. Maka buruh berhak untuk memperjuangkan hak-hak mereka dengan harapan agar "perjuangan kelas-kelas lama-lama berkembang menjadi kerja sama" (nr. 81). Jadi Paus tidak bertolak dari suatu perdamaian semu yang berdasarkan ketidakadilan. Kaum buruh boleh berjuang. Yang ditolak adalah perjuangan kelas yang mau menghancurkan kelas lawan; tujuan perjuangan kaum buruh adalah pencapaian hak-hak mereka. Perdamaian dalam masyarakat hanya mungkin atas dasar keadilan.

Ketiga, ensiklik ini untuk pertama kalinya mengemukakan prinsip subsidiaritas sebagai prinsip dasar pengaturan masyarakat.

(3) Johannes XXIII: MATER ET MAGISTRA (1961)

Ensiklik ini berada diambang antara tahap kedua dan ketiga ASC. Tekanan tidak lagi pada suatu uraian sistematis teoretis dengan argumentasi atas dasar teori hukum kodrat, melainkan pada pendekatan yang lebih empiris sosiologis, dengan motivasi yang lebih teologis dan pastoral. Banyak ajaran dari ensiklik-ensiklik sebelumnya dikemukakan kembali. Untuk pertama kali kaum tani mendapat perhatian khusus. Paus memberi pelajaran nasehat praktis kepada mereka (yang oleh kebanyakan ahli diberi sambutan kurang antusias).

Kecuali itu "Mater et Magistra" mencerminkan peralihan perhatian Gereja dari masalah kaum buruh industri ke negara-negara berkembang: masalah utama masa kini adalah pertentangan tajam antara kesejahteraan negara-negara maju dan kemiskinan mengerikan negara-negara yang berpenduduk tinggi.

(4) Johannes XXIII: PACEM IN TERRIS (1963)

Ensiklik mengenai perdamaian ini - perdamaian hanya mungkin berdasarkan kebenaran, keadilan, cintakasih dan kebebasan (80) - sebenarnya bukan mengenai penyusunan masyarakat, namun perlu disebut di sini karena di dalamnya Gereja Katolik untuk pertama kali secara resmi mengambil oper dan memperjuangkan hak-hak asasi manusia. Karena antiberalismenya Gereja lama sekali mendiamkan hak-hak asasi manusia. Baru "Pacem in Terris" mengumandangkannya dengan nyaring sebagai bagian integral gambaran Gereja tentang manusia. Secara eksplisit Paus menyebut piagam hak-hak asasi manusia PBB 1948 (itu pun suatu "tanda jaman": sebelumnya Gereja selalu enggan mengakui bahwa ada pola berpikir atau faham yang diambil oper dari dunia luar; seakan-akan segala-galanya harus ditetaskannya sendiri; baru Johannes XXIII dan penggantinya tidak takut lagi mengambil oper sesuatu dari luar lingkungan Gereja). Sejak "Pacem in Terris" tidak dapat dibenarkan lagi orang Katolik menganggap sepi masalah hak-hak asasi.

(5) Konsili Vatikan II: GAUDIUM ET SPES (1965)

Konstitusi pastoral Konsili Vatikan II tentang "Gereja dalam dunia sekarang" menunjukkan suatu pendekatan baru terhadap dunia. Konsili tidak mau menggurui umat manusia lagi (bdk. "Mater et Magistra", "Ibu dan Guru"), melainkan mau memperlihatkan bagaimana Gereja memahami diri dalam hubungan dengan dunia (3). Konsili tidak mau menekan melainkan mengajak. Nada konsili itu merupakan perubahan pendekatan Gereja terhadap dunia yang mendalam.

Gereja membicarakan sikapnya terhadap seluruh kekayaan kehidupan manusia di dunia ini dalam pelbagai dimensi. Dari ajarannya yang sedemikian kaya itu di sini hanya dipetik dua hal saja. Pertama, manusia ditegaskan menjadi dasar, sumber pembawa dan tujuan semua lembaga sosial (I.1). Hal itu, misalnya, berarti prioritas pekerjaan manusia terhadap modal dalam proses produksi industrial (67). Unsur kedua adalah suatu distingsi penting yang, seperti hal pertama di atas, kemudian berulang-ulang disuarakan oleh Paus Johannes Paulus II: distingsi antara tugas Gereja sebagai lembaga dan tugas para anggota Gereja (bdk. 42.43): Sebagai lembaga Gereja secara resmi mengambil sikapnya melalui tindakan dan wejangan hirarki. Sedangkan para anggota Gereja tidak bicara atas nama Gereja, melainkan atas nama serta berdasarkan keahlian mereka sendiri, tetapi dalam Roh Yesus dan semangat Gereja. Berhubungan dengan itu ditegaskan perbedaan tugas kaum awam dan para imam (sebagai anggota hirarki): mewujudkan tanggungjawab Gereja dalam dunia pertama-tama merupakan tugas kaum awam; sedangkan mereka boleh mengharapkan dari para imam "cahaya dan kekuatan" (nr. 43). Perbedaan tugas ini sekaligus mau mengikis habitus-sisa klerikalisme di mana segala tugas Gereja mau ditentukan oleh klerus (uskup dan para imam).

(6) Paulus VI: PROGRESSIO POPULORUM (1967)

Ensiklik ini mengenai perbedaan antara negara-negara kaya dan negara-negara miskin yang semakin besar. "Waktu sudah mendesak. Terlalu banyak orang menderita, dan jarak yang menisahkan kemajuan yang satu dari kemunduran, atau lebih tepat, kemunduran yang satunya semakin besar" (nr. 29). Dalam ensiklik ini Paus mencela kapitalisme liberal yang hanya mencari keuntungan dan hubungan-hubungan dagang antara negara-negara industri yang tidak adil. Ia menuntut agar negara-negara kaya menyingkirkan sebagian dari produksi mereka untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan negara lain-lain.

Ia menuntut "perubahan-perubahan perintis yang berani" (nr. 32), jangan sampai "kekayaan kaum kaya dan kekuasaan kaum berkuasa tumbuh terus sedangkan kemiskinan kaum miskin dan ketertindasan kaum tertindas diperkuat dan bertambah" (nr. 33). Jadi Paus menuntut perubahan struktur-struktur yang tidak adil. "Dengan berani kita harus menghadapi situasi sekarang dan menentang ketidakadilan serta mengalahkannya" (nr. 32).

Dalam hubungan ini terdapat nr. 31 yang termasyur karena di situ Paus memang menolak revolusi, tetapi, itulah yang luar biasa, tidak secara mutlak, artinya ada situasi ekstrim di mana belum tentu revolusi itu harus dikutuk: "Bagaimana pun juga; setiap pemberontakan revolusioner - kecuali dalam hal kekuasaan kekerasan yang jelas dan bertahan lama, yang secara berat melanggar hak-hak asasi person dan merugikan kesejahteraan negara secara berat - menimbulkan ketidakadilan baru, membawa gangguan-gangguan keseimbangan yang baru, menghasilkan kemerosotan-kemerosotan yang baru. Keadaan buruk tidak boleh disir dengan keadaan yang lebih buruk lagi". Karena teks ini sering dibaca sebagai pembenaran penggunaan kekerasan dalam keadaan ekstrim, Paulus VI setahun kemudian berulang-ulang, secara eksplisit menolak penggunaan kekerasan.

(7) Paulus VI: OCTOGESIMA ADVENIENS (1971)

Surat ini memperingati 80 tahun terbitnya "Rerum Novarum". Tidak dibahas masalah tertentu melainkan diberi semacam gambaran umum tentang sikap Gereja terhadap masalah-masalah sosial serta ideologi-ideologi yang mau memecahkannya. Ditegaskan sekali lagi bahwa Gereja tidak merasa berkeahlian untuk menawarkan pemecahan-pemecahan kongkrit terhadap masalah-masalah kehidupan masyarakat. A.L. terdapat suatu pembahasan yang cukup seksama terhadap apa yang dimaksud dengan "Marxisme".

(8) Paulus VI: EVANGELII NUNTIANDI (1975)

Hasil sinoda uskup-uskup sedunia di Roma 1974 dimuat dalam dokumen sinoda itu "Keadilan dalam Dunia". Di bawah pengaruh uskup-uskup dari Amerika dokumen itu menegaskan bahwa evangelisasi dan mengadakan usaha pembebasan manusia dari segala bentuk penindasan dan ketidakadilan. Untuk menanggapi harapan para uskup Paus Pulus VI menerbitkan Surat Apostolik "Evangelii Nuntiandi" tentang peraturan Gereja untuk menaklukkan dan melaksanakan injil. Di dalamnya Paulus VI menolak segala identifikasi pembebasan sosial dengan pembebasan yang dibawa Kristus, tetapi di lain pihak menegaskan bahwa pembebasan injili juga memuat usaha pembebasan sosial sebagai salah satu dimensi hakiki. "Keselamatan ... merupakan pembebasan dari segala sesuatu yang menindas manusia, tetapi di atas segala-galanya merupakan pembebasan dari dosa ..." (nr. 9). "Di antara evangelisasi dan kemajuan umat manusia - pembangunan dan pembebasan - sesungguhnya terdapat kaitan-kaitan yang mendalam ... Rencana Penebusan menyentuh situasi-situasi konkret ketidakadilan yang mesti dibantarkan dan keadilan yang mesti dipulihkan" (nr. 31). Dan sesudah menyebut "ke-laparan, penyakit-penyakit kronis, buta huruf, kemelaratan, ketidakadilan ... neokolonialisme ekonomi dan kebudayaan ..." ditegaskan bahwa "Gereja ... berkewajiban mempermaklumkan pembebasan jutaan makhluk manusia ..." (nr. 30). Dalam nr. 37 sekali lagi ditolak jalan kekerasan. Dokumen yang tidak khusus mengenai masalah-masalah sosial ini penting karena memberi uraian seimbang tentang tempat keterlibatan sosial Gereja dalam tugas satu-satunya, yaitu evangelisasi.

(9) Johannes Paulus II: LABOREM EXERCENS (1981)

Untuk memperingati 90 tahun "Rerum Novarum" Paus Johannes Paulus II menerbitkan sebuah ensiklik besar mengenai pekerjaan manusia yang penting dan berbobot. Untuk pertama kali pekerjaan sebagai salah satu kegiatan dasar manusia menjadi fokus perhatian seorang Paus. Mengingat bahwa hampir semua masalah keadilan sosial berkisar sekitar kedudukan manusia yang bekerja, ensiklik yang terutama mengenai kaum pekerja dalam proses produksi modern ini merupakan suatu dokumen dasar untuk menemukan sikap Gereja terhadap ketidakadilan. Uraian berikut mengikuti uraian Prof. J. Sohasching SJ.

Ensiklik ini membuktikan bahwa anggapan bahwa Paus Johannes Paulus II condong untuk memomorduakan keterlibatan sosial Gereja adalah tidak benar. Peraturan Gereja di bidang sosial dirumuskan dengan tegas: Gereja bertugas untuk mendasarkan dan membela martabat dan hak manusia pekerja; untuk menela situasi di mana martabat dan hak-hak itu dilanggar; dan untuk ikut menyumbang agar perubahan-perubahan struktur-struktur sosial yang perlu dilaksanakan. Pekerjaan dalam arti yang solusi-luasnya menjadi istilah kunci untuk mengambil sikap terhadap masalah sosial. Penggunaan tenaga kerja sebagai barang dagangan yang dibawahkan terhadap kepentingan politik dan ekonomis demi keuntungan yang sebesar-besarnya harus ditolak, begitu juga kalau pekerjaan dijadikan sarana untuk pene-nuhan rencana-rencana produksi kolektivistis. Paus minta perhatian terhadap fakta bahwa penghisaran tenaga kerja itu dalam negara-negara dunia ketiga lebih gawat daripada apa yang terjadi pada permulaan revolusi industri. Untuk mengatasi situasi itu perlu suatu gambaran tentang manusia yang mengutamakan person terhadap benda dan pekerjaan terhadap modal. Sebagai "subyek pekerjaan" manusia tak pernah boleh dinomorduakan terhadap kepentingan produksi.

Berdasarkan gambaran manusia ini Paus menyatakan bahwa perpishan antara pekerjaan dan modal serta antara kaum buruh dan para majikan tidak dapat dibenarkan. Sejak semula prioritas pekerjaan terhadap modal harus diakui. Bagaimana prioritas itu harus dilaksanakan secara kongkrit tidak ditentukan oleh Paus. Namun diajukan beberapa usul: kaum buruh ikut memiliki modal produktif; sarana-sarana produksi tertentu dapat disosialisasikan; pemilihan tanah oleh segelintir orang dikecam. Dengan istilah "majikan tak langsung" dikemukakan pengaruh struktur-struktur kehidupan sosial-ekonomis bagi kedudukan manusia pekerja. Hak-hak dasar buruh seperti hak untuk berserikat dengan bebas, untuk memperjuangkan syarat-syarat kerja yang adil, kalau perlu melalui pemogokan, tetapi juga perlunya agar diberi perhatian terhadap masalah seperti kesempatan kerja, wanita pekerjaan, kaum cacat, kaum emigran ditegaskan.

3. Penutup

Apabila kita meninjau kembali perkembangan ASG maka ada beberapa garis yang semakin jelas: Dari pendekatan yang teoretis Gereja semakin bersedia untuk terlibat secara praktis juga. Dari suatu pendekatan yang hanya normatif semakin disadari pentingnya perubahan-perubahan struktural supaya kehidupan masyarakat dapat terwujud menurut norma-norma itu. Dan sekurang-kurangnya sebagai sikap dan maksud menjadi semakin jelas bahwa Gereja harus berada di fihak kaum miskin dan tertindas.

Bab V: Beberapa pokok ajaran sosial Gereja

Berikut ini akan dibicarakan beberapa pokok dalam ajaran sosial Gereja yang dapat dikatakan merupakan posisi atau sikap kongkrit Gereja dalam pengaturan kehidupan masyarakat.

1. Tentang hak milik pribadi

Tentang milik pribadi Gereja mengatakan dua hal: (1) Manusia mempunyai hak milik pribadi, jadi ia berhak secara asasi untuk memakai dan untuk secara eksklusif menentukan penggunaan barang-barang material. (2) Hak itu secara hakiki dan mendalam mempunyai fungsi sosial. Itu berarti bahwa barang-barang dunia pertama-tama diperuntukkan untuk pemenuhan kebutuhan semua orang, dan hanya supaya hal itu dapat terjadi secara manusiawi pengaturan fungsi dasar itu terjadi melalui hak milik pribadi. Mengapa hak milik pribadi perlu? Ada tiga alasan: 1. Tanggungjawab manusia dalam pekerjaan; supaya manusia bersedia untuk bekerja, ia harus mempunyai harapan bahwa hasil kerjanya betul-betul dimilikinya, jadi bahwa ia betul-betul dapat menikmati hasil kerjanya bersama keluarganya. 2. Hak milik pribadi memberi pembatasan dan penentuan wewenang dan tanggungjawab terhadap penggunaan barang-barang material yang jelas. 3. Hak milik pribadi juga perlu demi martabat dan kebebasan manusia. Kalau segala apa dimiliki bersama, individu sama sekali tergantung dari masyarakat, ia tidak dapat mempertahankan kemandiriannya.

Karena fungsi sosial hak milik pribadi, maka hak itu boleh diatur oleh negara. Nasionalisasi atau sosialisasi (pengalihan hak milik pribadi menjadi hak milik seluruh masyarakat) boleh kalau itu perlu demi kesejahteraan umum dan asal dijalankan sesuai dengan tuntutan keadilan. Tidak ada hak milik pribadi yang mutlak dan tak terbatas (PP23). Hal itu terutama berlaku bagi milik produktif, artinya milik yang dapat dipakai untuk menambah kekayaan (pabrik-pabrik, tanah). - Perlu diusahakan supaya sebanyak mungkin golongan dalam masyarakat dapat ikut memiliki modal dan hasil produksi.

2. Hubungan kerja

a. Martabat pekerjaan

Pekerjaan merupakan dimensi fundamental dalam kehidupan manusia (LE4). Sebagai citra Allah manusia memanusiation alam dan melalui pekerjaan menemukan dirinya sendiri. Maka pekerjaan adalah kegiatan yang bernilai luhur dalam pandangan Gereja. Gereja menegakkan bahwa pekerjaan (kepentingan manusia pekerja) harus didahulukan terhadap kepentingan modal (untuk menambahkan modal). Modal dan semua barang milik manusia tidak ada yang terjadi tanpa pekerjaan manusia. Maka buruh tidak boleh dikurbankan demi kepentingan modal.

b. Upah yang adil

Gereja menganggap perpisahan antara pemilik modal dan pekerja sebagai tidak tepat. Sebenarnya si pekerja harus juga menjadi pemilik. Namun Gereja merasa bukan tugasnya untuk mengusulkan bagaimana hubungan itu harus diwujudkan secara kongkrit. Maka Gereja juga tidak secara prinsipil menolak hubungan kerja upahan - asal upahnya adil. Tuntutan keadilan upah pertama berarti bahwa tingginya upah tidak boleh diserahkan pada mekanis-

me pasar. Pekerjaan bukan sekedar faktor industri. Melainkan ada tiga segi untuk penentuan upah (QA 70-75): 1. Kebutuhan hidup buruh dan keluarganya; 2. kemampuan perusahaan; 3. kesejahteraan umum. Pada prinsipnya berlaku: hasil kerja penuh seorang pekerja harus mencukupi agar ia bersama keluarganya dapat hidup secara wajar (QA 71).

c. Hak untuk berserikat

Dalam QA diakui bahwa masyarakat terdiri dari kelas-kelas dengan kepentingan yang berlawanan. Pengakuan itu saja sudah merupakan suatu langkah penting karena dengan demikian ditolak gambaran palsu seakan-akan masyarakat sudah merupakan suatu keluarga yang rukun di mana semua harus puas dengan kedudukan mereka masing-masing. Kita dapat mengatakan bahwa masyarakat seharusnya merupakan suatu keluarga besar, tetapi bahwa perbedaan antara kelas-kelas menghalangi pewujudan itu.

Yang harus menjadi tujuan ialah agar pertentangan antar kelas itu diatasi. Buruh-buruh berhak untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Dengan demikian Gereja mengakui bahwa kepentingan kelas-kelas saling berlawanan dan bahwa suatu perjuangan antar kelas itu berhak ada, bahkan perlu. Kaum buruh berhak untuk beroposisi, tetapi tidak demi untuk oposisi itu sendiri, melainkan untuk menciptakan persatuan berdasarkan keadilan (cf. LE nr.20). Perjuangan kelas buruh untuk memperoleh hak-hak mereka dan demi keadilan sosial (ib.) dalam ajaran Gereja dibedakan dari "perjuangan kelas" dalam arti marxis karena tujuannya bukan untuk melawan siapa-siapa, apalagi untuk menghancurkan kelas lawan, melainkan untuk mewujudkan keadilan. Itu penting sekali kita perhatikan. Suatu perjuangan kelas penuh kebendiaan yang mau meniadakan lawan adalah bertentangan dengan sikap kristiani, tetapi begitu pula harus ditolak anggapan kabur tentang suatu kekeluargaan yang sebenarnya hanya bermaksud untuk menggerogoti hak buruh untuk berjuang. Maka Gereja menuntut agar hak mogok wajib dilindungi, tetapi hanya dipergunakan sebagai sarana terakhir mengingat kepentingan umum.

Kaum buruh hanya dapat berjuang apabila mereka bersatu. Oleh karena itu ensiklik sosial pertama, RN, telah mengakui hak kaum buruh untuk berserikat dengan bebas. Sesudah RN masih dipersoalkan apakah buruh Katolik harus membentuk Serikat buruh Katolik, tetapi sesudah perang dunia II masalah itu tidak lagi aktual. Tugas serikat-serikat buruh adalah untuk memperjuangkan hak-hak sah kaum buruh berhadapan dengan para majikan. Hak berserikat itu suatu hak asasi kaum buruh dan wajib diakui.

d. Tugas negara

ASG mengatakan bahwa negara mempunyai kewajiban untuk melindungi kaum buruh terhadap majikan yang tidak adil. Dengan ajaran itu ditolak paham negara liberal yang membatasi tugas negara pada penjaminan keamanan dan menyerahkan pengaturan hubungan antara buruh dan majikan terhadap persaingan bebas. "Adalah kekeliruan dasar ilmu ekonomi individualis" bahwa pengaturan bidang ekonomi yang adil dapat diserahkan kepada persaingan bebas (QA 88). Dengan demikian ASG menunjuk jalan ke negara sosial modern.

Juga termasuk tugas negara untuk mengambil tindakan-tindakan struktural untuk memperbaiki kedudukan kaum buruh, terutama untuk mengatasi perbedaan tajam antara para pemilik modal dan kaum buruh. Di situ termasuk apa yang disebut "Mitbestimmung", "Codetermination" atau "ikut menentukan", artinya hak kaum buruh untuk melalui wakil mereka ikut menentukan kebijaksanaan ekonomis perusahaan di mana mereka bekerja; saham rakyat di mana hak milik disebarakan atas seluruh masyarakat; kemungkinan kaum buruh untuk memiliki perusahaan di mana mereka bekerja (cf. LE 14).

3. Kapitalisme dan Sosialisme

a. Kapitalisme

Apabila kita menanyakan sikap Gereja terhadap kapitalisme, perlu kita perhatikan apa yang dimaksud dengan istilah itu. ASG jarang mempergunakan istilah "kapitalisme", melainkan bicara tentang "cara ekonomi kapitalis". Yang dimaksud ialah cara produksi berdasarkan hak milik pribadi atas alat-

alat produksi dan kebebasan untuk berusaha; ciri khas cara produksi itu ialah bahwa sarana-sarana produksi (tanah, gedung, mesin) tidak berada dalam tangan mereka yang menyumbangkan pekerjaan, artinya perpisahan antara modal dan pekerjaan.

Kapitalisme itu terutama dibicarakan dalam ensiklik QA, PP dan LE. Kapitalisme tidak pada dirinya sendiri dinilai jelek, artinya yang ditolak bukan perpisahan antara modal dan pekerjaan dan cara pekerjaan upahan itu sendiri, melainkan apabila modal memeralat pekerjaan untuk mencapai keuntungan baginya tanpa menghiraukan martabat buruh (cf. QA 101). Yang dikritik dengan tajam adalah pemusatan kekuasaan ekonomis dalam tangan orang sedikit yang memuncak dalam "modal keuangan" ("Finanekapital") di mana bank-bank melalui perkreditan menguasai seluruh kehidupan ekonomis. Jadi yang dikritik adalah sistem ekonomi di mana "keuntungan adalah motor kemajuan ekonomis yang sebenarnya, persaingan hukum tertinggi ekonomi, hak milik pribadi terhadap alat-alat produksi merupakan hak mutlak, tanpa batas-batas, tanpa kewajiban-kewajiban seimbang terhadap masyarakat" (PP nr.26). Persaingan bebas - yang tidak dengan sendirinya jelek - tidak boleh menjadi hukum tertinggi pengaturan ekonomi karena tidak dengan sendirinya menghasilkan keadaan yang adil.

Dalam negara-negara industri kapitalisme murni sudah lama tidak ada lagi. Perjuangan kaum buruh melalui serikat-serikat mereka yang amat berkesan sudah menghasilkan suatu "kapitalisme yang dinjatkan secara sosial" dalam rangka negara sejahtera (welfare state). Bukan kapitalisme itulah yang dikritik (walaupun tetap terkena kritik sejauh gejala-gejala yang ditolak Gereja terdapat di dalamnya). Tetapi justru di negara-negara yang secara ekonomis lemah, terutama di beberapa negara "dunia ketiga", kapitalisme murni mulai hidup lagi, ditunjang oleh suatu ideologi pembangunan yang hanya mementingkan penciptaan modal dan keuntungan kelas-kelas yang menguasai modal tersebut. Kapitalisme itu yang sepenuhnya terkena kritik ASG.

Sebagai penutup dapat ditambah bahwa sistem-sistem ekonomi di dunia sedemikian banyak bentuk dan peperinciannya serta sedemikian kompleks sehingga istilah "kapitalisme" tidak lagi mempunyai banyak arti ilmiah, melainkan lebih bersifat populer untuk memberi cap negatif atau positif kepada suatu sistem. Maka sebaiknya istilah itu dipergunakan dengan hemat dan diganti dengan deskripsi nyata suatu sistem ekonomis.

b. Sosialisme

Tidaklah mudah untuk merumuskan apa yang dikatakan oleh ASG tentang sosialisme. QA membedakan sosialisme ekstrim, yaitu komunisme, dan sosialisme moderat. Aliran ekstrim ditolak karena perjuangan kelas yang menuju penghancuran lawan kelas dan karena menolak hak milik pribadi. Tetapi aliran moderat pun ditolak. Itulah yang kemudian membingungkan mereka yang merasa bahwa sosialisme merupakan faham kehidupan masyarakat yang sesuai dengan injil.

Namun dalam penolakan itu (QA 120) perlu diperhatikan bagaimana sosialisme digambarkan. QA (118, 119) menyebut sebagai sosialisme suatu faham yang memandang masyarakat sebagai usaha untuk memperoleh manfaat bersama sebanyak-banyaknya saja, tanpa memperhatikan segi-segi kemanusiaan yang lebih luhur. Jadi suatu sistem yang mau membuat kehidupan itu enak saja, yang membawahkan nilai-nilai kemanusiaan, terutama kebebasannya, terhadap keperluan untuk memproduksi barang serasional mungkin.

Kiranya jelas bahwa faham seperti itu tidak mungkin diterima oleh orang kristiani. Tetapi ada juga sosialisme-sosialisme yang tidak mengesut faham itu melainkan yang bermaksud untuk membangun suatu kehidupan masyarakat yang tidak dibawahkan terhadap kepentingan produksi barang belaka. Maka yang perlu kita perhatikan bukanlah apakah suatu aliran atau gerakan menamakan diri sosialis, melainkan apa yang menjadi programnya. Kolektivisme, perjuangan kelas sebagai tujuan pada dirinya sendiri, penolakan prinsipial terhadap hak milik pribadi, pengaturan masyarakat dari atas semata-mata demi maksimalisasi produksi itulah yang ditolak oleh Gereja. Maka sosialisme-sosialisme yang bersikap demikian tidak dapat diterima. Sedangkan yang lain-lain harus dinilai menurut jasa dan kelemahan masing-masing. Oleh karena itu OCTOGESIMA ADVENIENS tidak lagi memuat penolakan mutlak terhadap apa saja yang menamakan diri sosialisme, melainkan pada hakekatnya menggarisbawahi tanggungjawab orang kristiani sendiri dalam mengambil sikap.

4. Negara-negara berkembang

Ensiklik MM merupakan tanda bahwa Gereja mulai menyadari bahwa masalah keadilan bersifat global, artinya menyangkut seluruh dunia. Ensiklik itu sudah melihat masalah yang terletak dalam perbedaan kesejahteraan antara negara-negara industri dan negara-negara berpenduduk banyak. Ensiklik yang secara khusus membicarakan negara-negara berkembang adalah PROGRESSIO POPULORUM. Ada tiga gagasan utama yang dikemukakan.

(1) Perlu diciptakan hubungan-hubungan adil antara negara-negara berkembang dan negara-negara industri. Hubungan yang adil itu tidak terwujud dengan sendirinya. Karena negara-negara industri lebih kuat secara ekonomis, mereka beruntung dari struktur perdagangan internasional yang ada. Negara-negara berkembang terpaksa menerima syarat-syarat perdagangan yang menguntungkan bagi negara-negara industri.

(2) Perkembangan atau pembangunan (development) jangan difahami secara ekonomis belaka. Perlu suatu perkembangan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh umat manusia. Hanya humanisme yang terbuka terhadap Yang Mutlak sungguh-sungguh bersifat manusiawi.

(3) Ditekankan hubungan erat antara perkembangan dan perdamaian. "Pembangunan, nama baru bagi perdamaian" adalah judul bagian terakhir PP. Perdamaian internasional hanya dapat dijamin apabila semua bangsa di dunia dapat hidup secara wajar.

Sekarang, 16 tahun sesudah PP, kita melihat bahwa ensiklik itu masih jauh terlalu optimis, masih terlalu percaya akan kemajuan kemanusiaan. Tetapi justru karena keadaan banyak bangsa tidak menjadi lebih baik, melainkan lebih buruk, perjuangan demi keadilan dan tingkat hidup yang wajar bagi negara-negara berkembang semakin aktual.

5. Hak-hak asasi manusia

Hak-hak asasi manusia hanya dengan pelan-pelan masuk ke dalam ajaran Gereja walaupun RN dan QA sudah memuat hak-hak terpenting manusia pekerja. Pendobrakan terjadi dalam PT. Di situ dikatakan bahwa martabat person manusia dan pengakuannya merupakan dasar setiap kehidupan bersama manusiawi yang teratur. Kemudian diajukan sebuah daftar hak-hak asasi manusia dan kewajiban-kewajiban yang sesuai yang luas. Konstitusi GeS kembali menggariskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban asasi manusia (nr. 26 dll.). Sejak itu Gereja berulang-ulang mengatakan (misalnya sinode para uskup 1974) bahwa injil mewajibkannya untuk memajukan hak-hak asasi manusia. Dokumen terakhir adalah LE di mana Paus Johannes Paulus kedua menulis bahwa pekerjaan merupakan "sumber hak-hak pekerja. Hak-hak itu harus diselidiki dalam hubungan besar dengan hak-hak manusia seluruhnya, hak-hak yang berkaitan dengan kodrat manusia dan daripadanya banyak telah diproklamasikan oleh pelbagai lembaga internasional ... Hormat terhadap susunan luas hak-hak asasi merupakan syarat dasar bagi perdamaian di dunia sekarang" (16).

6. Dua masalah yang semakin mendesak

a. Perang dan persenjataan

Masalah pertama adalah masalah perang dan persenjataan. Ajaran tradisional Gereja hanya membenarkan apa yang dinamakan "perang yang adil", yang dianggap terdapat apabila (1) terdapat pelanggaran hak yang kontinu dan keras, (2) cara-cara damai untuk mengakhirkannya telah habis, (3) besarnya pelanggaran seimbang dengan kemungkinan kerugian suatu perang dan (4) probabilitas bahwa perang berhasil untuk mengakhiri pelanggaran adalah cukup besar.

Pius XII sudah menyadari bahwa ajaran itu terhadap pengerian perang atom meragukan. Namun Beliau, begitu pula Konsili Vatikan II (GeS) belum seluruhnya menolak perang. GeS mengutuk perang total (yang tidak hanya diarahkan pada penghancuran seluruh masyarakat) dan persaingan persenjataan. Namun sementara ini Paus Paulus VI dan Paus Johannes Paulus II semakin terang menolak perang dan persenjataan atom tanpa syarat. Sebagai akibat sikap itu Gereja-Gereja lokal juga mulai berubah. Misalnya konpensi uskup-uskup Amerika Serikat pada akhir 1982 merumuskan suatu dokumen

yang menolak kelanjutan persenjataan atom dan menuntut perlucutan senjata atom sefihak. Belum tentu bahwa mayoritas orang Katolik setuju. Perkembangan yang sama juga kelihatan dalam Gereja-Gereja Protestan. Kiranya perkembangan kesadaran itu baru mulai.

b. Masalah lingkungan

Semakin banyak kalangan orang kristiani ikut merasakan masalah pemeliharaan lingkungan walaupun mereka yang secara terorganisasi memperjuangkan hasrat itu masih merupakan suatu minoritas kecil. Bagi mereka pemeliharaan lingkungan bukan sekedar demi untuk menjamin masa depan manusia sendiri, melainkan merupakan unsur hakiki suatu kesadaran tanggungjawab otis yang baru. Dalam dokumen-dokumen resmi Gereja masalah itu hampir belum muncul sama sekali.

7. Penutup: dua prinsip dasar

Dengan mengikuti Werner Heierle (Pfürtner/Heierle, Einführung in die Katholische Soziallehre, Darmstadt 1980, hal. 139 ss.) dapat dikatakan bahwa ajaran Gereja Katolik tentang hubungan antara individu dan masyarakat berdasarkan dua prinsip, prinsip solidaritas dan prinsip subsidiaritas.

a. Prinsip solidaritas

Prinsip pertama yang juga dapat disebut prinsip kesetiakawanan, mengatakan bahwa semua orang membutuhkan satu sama lain, bahwa mereka bersama-sama terikat dalam nasib masyarakat seluruhnya seperti keseluruhan masyarakat tak dapat dilepaskan dari nasib masing-masing anggotanya. Oleh karena itu masing-masing orang harus ikut bertanggungjawab terhadap kesejahteraan dan kemunduran masyarakat sebagaimana sebaliknya masyarakat bertanggungjawab terhadap kesejahteraan dan kemunduran masing-masing anggotanya.

Secara sederhana prinsip solidaritas mengatakan bahwa kita semua bukan pulau-pulau sendiri-sendiri melainkan tergantung satu sama lain dan oleh karena itu juga bertanggungjawab satu sama yang lain, bahwa kita tidak boleh acuh tak acuh satu sama lain melainkan harus bersetiakawanan, senasib sepenanggungan.

b. Prinsip subsidiaritas

Prinsip subsidiaritas mengatakan bahwa negara dan fihak yang lebih luas pada umumnya dapat memberikan pelbagai bantuan bagi individu atau kelompok-kelompok yang lebih kecil: (a) Bantuan yang diharapkan oleh individu di mana kemampuan individu tidak mencukupi; (b) negara seluruhnya mengambil oper suatu tindakan yang diharapkan oleh individu tetapi tidak sanggup untuk dilaksanakannya; (c) suatu tindakan campur tangan di mana individu tidak melihat keperluannya, tetapi negara menilai bahwa individu tidak secukupnya dapat menyelesaikan tugasnya itu.

Prinsip itu mempunyai segi negatif dan segi positif. Secara negatif prinsip subsidiaritas mengatakan bahwa negara dan, pada umumnya, satuan-satuan lebih besar/luas tidak boleh mencampuri atau merebut mengambil tindakan yang dapat secukupnya diselesaikan oleh individu atau satuan-satuan yang lebih kecil. Secara positif kelompok yang lebih besar harus membantu di mana individu atau kelompok yang lebih kecil tidak mampu untuk mencapai tujuannya.

Bab VI: Kerasulan sosial dalam Gereja

1. Pengantar

Sesudah kita melihat pokok-pokok ASG maka dalam bab ini akan dibicarakan beberapa masalah sekitar keterlibatan sosial Gereja. Harapan kami bahwa dengan demikian akan menjadi lebih jelas apa kedudukan kerasulan sosial dalam Gereja dan manakah cara-cara untuk menjalankannya.

Uraian ini terutama mendukung pada ucapan-ucapan dan tulisan-tulisan Paus Johannes Paulus II (dalam ini penulis sangat dibantu oleh karangan "Das neue politische Engagement der Kirche" oleh Prof. E.W. Böckenförde, Stimmen der Zeit 1980, 219-234). Di satu pihak tidak dapat diragukan bahwa Paus Johannes Paulus II mendukung peranan Gereja dalam perjuangan melawan ketidakadilan. Pidato Beliau di depan sejuta petani Indian di Oaxaca Mexico di mana Beliau menuntut pembagian tanah para landlord kepada para penggarap, kutukan terhadap ketidakadilan, pembunuhan dan penculikan di Guatemala-City (OR 18.3.83 hal. 14) dan banyak ucapan lain bernada sangat keras. Di lain pihak Paus ini kelihatan dingin terhadap teologi pembebasan. Berulang kali ia mengecam kaum rohaniwan dan rohaniwati yang memasuki bidang politik, yang seakan-akan melepaskan kesaksian injil demi keterlibatan dalam perjuangan sosial.

Namun ternyata sikap Paus Johannes Paulus II berdasarkan beberapa prinsip yang akan membantu kita untuk lebih memerincikan sifat perjuangan Gereja demi suatu masyarakat yang lebih adil.

2. Pondasi kristologis

Tugas perutusan Gereja dalam masyarakat berdasarkan rahasia Kristus: baru dalam Kristus manusia dapat mengerti siapakah dia itu. Oleh karena itu Kristus menjadi tolok ukur terhadap keterlibatan Gereja dalam dunia. Martabat manusia berakar dalam martabatnya sebagai citra Allah.

Pendekatan Paus Johannes Paulus II itu berbeda dari pendekatan ASG tradisional yang berdasarkan faham hukum kodrat yang bersifat falsafi. Keterlibatan pada keadilan didasarkan tegas-tegas pada inti iman kristiani sendiri. Perutusan Gereja bukan berdasarkan suatu filsafat melainkan injil. Yesus Kristus sebagai ukuran bagi martabat manusia.

Tentu hal ini tidak berarti bahwa pertimbangan-pertimbangan falsafi tidak perlu lagi. Berdasarkan pertimbangan itu kita dapat bekerja sama dengan semua pihak yang memperhatikan keadilan. Melainkan itu berarti bahwa perjuangan demi keadilan yang kita usahakan bersama semua orang yang menjunjung tinggi martabat manusia, termasuk inti perutusan kristiani.

3. Berfihak pada kaum miskin

"Kristus berdiri di pihak kaum miskin" (Puebla). Maka Gereja pun harus berdiri di pihak kaum miskin. Sikap ini harus mendasari sikap Gereja dalam dunia.

Dalam hubungan ini sebaiknya kita sekedar merenungkan sikap berfihak Gereja ini. Tidak jarang dikemukakan, bahwa Gereja tidak boleh berfihak, tidak pada orang kaya, tetapi juga tidak pada orang miskin, melainkan harus terbuka bagi semua orang tanpa membedakan antar kelas dan golongan. Apa yang dapat dijawab terhadap sangkalan ini?

Pertama: Dilihat secara individual Gereja memang tidak boleh berfihak. Di hadapan Allah, dan dengan demikian di hadapan Gereja, setiap orang sama haknya untuk dibantu dalam harapan atas keselamatan. Tak ada perbedaan antara yang kaya dan yang miskin, semua membutuhkan keselamatan, kepada semua mereka Gereja diutus. Maka Gereja tidak boleh menolak orang kaya yang memerlukan bantuannya dengan argumen bahwa Gereja adalah Gereja bagi kaum miskin saja. Begitu pula dosa terdapat di antara kaum kaya dan kaum miskin, antara anggota kelas penghisap dan yang dihisap, semua membutuhkan penebusan, kepada mereka semua Gereja diutus. Dalam arti ini Gereja tidak boleh mendiskriminasikan.

Kedua: namun hal ini tidak berarti bahwa Gereja tidak boleh berfihak. Sudah jelas bahwa Gereja harus berfihak pada keadilan dan menentang keti-

dakadilan, harus berfihak pada sikap, usaha, struktur, mekanisme yang menunjang kejujuran, kebaikan, kesetiaan, keterbukaan hati, dan menentang sikap, usaha, struktur, mekanisme yang menggerogotinya. Jadi Gereja berfihak melawan dosa. Gereja harus menolak dosa dan menjaga semua struktur dan situasi yang dinilai lebih sesuai dengan martabat manusia sebagaimana dikehendaki Allah. Menolak dosa tidak berarti menolak pendosa. Tetapi Gereja wajib untuk mencela segala keadaan yang bertentangan dengan martabat manusia karena keadaan itu merupakan dosa obyektif. Menurut Paus Johannes Paulus II Gereja "harus menyebutkan ketidakadilan dengan jelas, ... harus menyebut setiap diskriminasi, setiap paksaan terhadap manusia, terhadap tubuhnya, terhadap rohnya, terhadap suara hatinya atau keyakinannya!" (OR 2.3.1979).

Ketiga: tetapi Gereja tidak hanya harus berfihak melawan semua keadaan yang merupakan dosa, melainkan juga berfihak pada kaum miskin dan tertindas dalam arti bahwa mereka adalah kelompok yang paling membutuhkan bantuan. Orang Samaria dalam perjalanan dari Jerusalem ke Jericho dipuji karena ia berfihak pada orang yang dirampok; tentu dia tidak akan dipuji andaikata ia hanya sebentar memperhatikan orang yang dirampok, kemudian berjalan-jalan terus dengan si imam dan si levit supaya ia berfihak pada semua; si imam dan levit dapat saja sendirian melanjutkan perjalanan, tetapi yang dirampok membutuhkan bantuan: dilah dan bukan si imam dan si levit menjadi "sesama" orang Samaria. Maka walaupun Gereja tidak menolak siapa pun yang datang minta bantuan, namun perhatiannya wajib diarahkan kepada mereka yang lebih memerlukan bantuan. Mereka itulah - yang lapar, haus, tidak memiliki pakaian cukup, sakit, di penjara (Mt. 25) - harus diberi perhatian khusus. Jadi di mana Gereja sendiri menentukan karya mana yang mau dijalankannya, golongan mana yang mau terutama dilayani, tempat mana yang perlu didatangi, Gereja jelas harus berfihak. Berfihak pada sesama, dan sesama itu orang yang lapar, lemah, miskin, tertindas. Yang menjadi masalah ialah bahwa persentase perhatian, pengerahan tenaga orang-orang gerejawi dan sarana material sekarang tidak terutama diarahkan kepada mereka yang menurut Kristus menjadi sesama kita, melainkan terhadap mereka yang bisa hidup tanpa kita.

Orang Samaria itu masih memperlihatkan kenyataan lain lagi: tidak mungkin kita bersikap netral. Andaikata dia memberi perhatiannya dengan bagian yang sama kepada tiga orang dalam cerita itu, orang yang dirampok, si imam dan si levit, hal itu de facto akan berarti bahwa ia tidak menyelamatkan satu-satunya yang membutuhkannya, yaitu orang yang dirampok; karena dia itu yang memerlukan perhatian seluruhnya selama beberapa waktu. Tak mungkin Gereja berfihak pada semua apabila semua itu dibagi antara yang kuat, kaya dan sehat di satu fihak dan yang lemah, miskin dan sakit di lain fihak. Ternyata omongan tentang "Gereja harus berfihak pada semua" tidak berisi: berfihak pada semua berarti berfihak pada yang tidak membutuhkan bantuan dan melalakan "sesama" yang sebenarnya.

4. Tugas Gereja sebagai pengembal jabatan nabi

Pergeseran dari sikap "menggurui" ke sikap menjadi "nabi" yang telah dibicarakan nampak dalam banyak ucapan Paus Johannes Paulus II. Menurut Beliau Gereja wajib untuk mewartakan seluruh kebenaran tentang manusia: pembebasannya dari segala perbudakan, pengangkatannya oleh Kristus, berhadapan dengan setiap kekuasaan, tanpa memperhatikan kepentingan-kepentingan lain (Puebla). Sebagai nabi, Gereja menyadari bahwa Gereja akan menderita penganiayaan demi injil (Dublin). Gereja tidak mempunyai pemecahan-pemecahan tertentu bagi masalah-masalah umat manusia, tetap dalam semangat Kristus Gereja tahu apa yang dituntut dalam setiap situasi.

5. Usaha Gereja bersifat bukan-politik dan politik

Di sini muncul pertanyaan: sejauh mana Gereja dan orang-orang Gereja boleh melibatkan diri di bidang politik? Tentang orang-orang Gereja akan dibicarakan dalam pasal berikut. Di sini dibicarakan dalam arti apa perutusan Gereja demi keadilan bersifat politik.

Apabila dengan politik dimaksud pengurusan negara, pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan seluruh masyarakat dan usaha untuk mencapai kedudukan yang mengijinkan pengambilan keputusan semacam itu (usaha

untuk mencapai kedudukan yang berkuasa) maka Gereja sebagai Gereja (arti-nya: Gereja sebagai keseluruhan, dibedakan dari anggota-anggota Gereja sebagai individu atau dalam kelompok) tidak berpolitik. Gereja tidak mempunyai tujuan-tujuan politik tertentu, tidak mendukung sistem politik tertentu dan tidak mau menjadi salah satu fihak dalam perconturan politik. Satu-satunya dasar keterlibatan Gereja dalam kehidupan sosial adalah perutusan injili. Atas dasar perutusan itu Gereja membela manusia dalam mar-tabatnya, dalam kebebasannya, memperjuangkan hak-hak asasi dan keadilan sosial, mengkritik keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang dibela itu.

Namun pelanggaran-pelanggaran terhadap martabat manusia, terhadap ke-bebasannya, terhadap hak-hak asasinya dan keadilan sosial bergandengan dengan kepentingan-kepentingan tertentu yang sendiri berkaitan dengan struktur-struktur kekuasaan dalam masyarakat. Oleh karena itu perjuangan Gereja mau tak mau menyangkut struktur-struktur kekuasaan itu. Dan oleh karena itu perutusan Gereja demi keadilan secara hakiki mempunyai dimensi politik. Gereja bagi sebagian masyarakat menjadi tumpuan harapan, bagi sebagian kekuatan suatu ancaman. Jadi Gereja memang tidak menjadi salah satu perebut pengaruh politik. Tetapi usaha untuk mengembalikan manusia pada martabatnya mau tak mau akan mengubah masyarakat dan dalam arti itu bersifat politik. Perjalanan Paus Johannes Paulus II ke Amerika Tengah pada permulaan 1983 direncanakan sebagai kunjungan pastoral, tetapi yang menyolok adalah dimensi politiknya.

6. Tugas hirarki dan tugas kaum awam

Mari kita lihat dulu beberapa wejangan Paus Johannes Paulus II. Di Puebla Beliau berseru kepada para imam Amerika Latin: "Biarlah kalian itu imam dan biarawan, bukan pemimpin sosial atau politik, atau fungsionaris salah satu kekuasaan ideologis!" Dalam pidato tgl. 27-2-1982 kepada para pimpinan Serikat Yesus Beliau mengatakan a.l.: "... dapat dimengerti mengapa Gereja menganggap dukungan terhadap keadilan sebagai bagian haiki penginjilannya ... Dalam bidang ini tidak semua mempunyai fungsi yang sama dan yang menyangkut para anggota Serikat Yesus maka tidak boleh dilupakan bahwa keterlibatan demi keadilan yang perlu harus dijalankan sesuai dengan panggilan kalian sebagai biarawan dan imam. Sebagaimana telah saya katakan pada tanggal 2 Juli di Rio de Janeiro, pelayanan imam 'apabila imam mau tetap setia terhadap dirinya sendiri, terutama dan secara hakiki ber-sifat rohani. Itu mau saya tekankan secara khusus pada hari ini berhadapan pelbagai aliran yang mau menyekularisasikan pelayanan iman sehingga pelayanan itu hanya mendapat arti filantropis. Pelayannya bukan pelayanan seorang dokter atau social worker, politikus atau pemimpin serikat buruh. Dalam situasi tertentu imam barangkali dapat mengambil oper tugas-tugas seperti itu, tetapi hanya sebagai wakil ... Imam harus memenuhi perutusan khusus bagi jiwa-jiwa, bagi hubungannya dengan Allah, dan bagi hubungan batin mereka antar mereka ... Memang, apabila situasi memuntutnya, ia tidak akan menolak untuk memberi bantuan material, melalui karya-karya kar-itatif dan melalui pembelaan keadilan. Tetapi ... itulah pada akhirnya suatu pelayanan sekunder' ..." (OR 12-3-1982).

Bagaimana ucapan-ucapan Bapak Suci ini dapat dimengerti?

(1) Diandaikan faham Gereja menurut LUMEN GENTIUM. Menurut faham itu Gereja itu bukan hanya hirarki, melainkan seluruh umat Allah. Maka kalau para imam dikatakan pertama-tama mempunyai tugas rohani, itu tidak berarti bahwa Gereja hanya mempunyai tugas rohani. Itu hanya berarti bahwa tidak semua dimensi perutusan Gereja harus dijalankan oleh para imam dan kaum rohani.

(2) Diandaikan suatu distingsi yang sudah dimuat dalam GAUDIUM ET SPES (nr. 42, 43): Gereja sebagai Gereja secara resmi berbicara dan bersikap melalui hirarki. Para Uskup bersama Sri Paus, dan imam-imam sebagai utus-annya dan dalam batas-batas perutusannya, bicara "atas nama Gereja". Se-dangkan para anggota Gereja tidak bicara atas nama Gereja, melainkan atas dasar tanggungjawab mereka sendiri, sebagai orang beriman, jadi dalam Roh dan semangat Gereja. Mereka menghadirkan Gereja dalam masyarakat. Mereka bebas untuk mengambil sikap terhadap masalah-masalah yang dihadapi dengan berpedoman pada ajaran resmi Gereja sebagai norma.

(3) Tugas untuk meresapi dunia dengan semangat injil adalah tugas khas kaum awam. Maka mereka juga berhak dan bahkan diharapkan untuk berpartisipasi dalam arti berusaha untuk dapat mengambil keputusan demi seluruh masyarakat. Merekalah yang hendaknya berbuat baik sebagai dokter atau membela hak kaum buruh dalam serikat-serikat buruh. Hal itu juga berlaku bagi apa yang disebut "institut sekular" seperti "Opus Dei".

(4) Para imam dan biarawan-biarawati (dua-duanya harus dibedakan: yang terakhir tidak termasuk hirarki, tetapi karena mereka merupakan golongan resmi Gereja sebagai Gereja, sikap dan tindakan mereka, menurut kekhasan masing-masing dan kemajemukan kehidupan membiara, dapat dikatakan mewakili Gereja sebagai keseluruhan; maka mereka dapat disebut bersamaan dengan imamat) juga terlibat demi keadilan, tetapi menurut panggilan mereka sebagai imam. Paus membedakan panggilan yang primer dan yang sekunder.

(a) Panggilan primer disebutnya "rohani". Yang dimaksud adalah pelayanan imam secara eksplisit dalam segala dimensi: memaklumkan injil dan keselamatannya, membawa keselamatan Allah melalui sakramen dan sabda yang menghibur, menyerukan pertobatan. Di situ juga termasuk ajaran sosial Gereja sendiri yang merupakan pewartaan injil dalam dimensi kehidupan masyarakat. Dapat dikatakan bahwa tugas primer imam itu berdasarkan hakikat hirarki, yaitu mempersatukan dan mengidentifikasi Gereja sebagai tanda keselamatan Allah.

Dapat ditanyakan apa yang menjadi ciri inti yang membedakan tugas primer "rohani" itu dari yang bukan primer? Jawaban kiranya dapat dirumus begini: Yang menjadi tugas primer adalah semua tugas dan fungsi yang kehilangan segala arti andakata orang tidak mempercayai injil atau andakata orang tidak percaya bahwa organisasi Gereja merupakan pewujudan umat Allah di dunia. Tugas-tugas primer tersebut di atas semua kehilangan segala arti tanpa pengandaian injil dan Gereja sebagai umat Allah. Sebaliknya, membangun keluarga, mengolah sawah, mengorganisasikan kaum buruh, berpolitik, mengajar dan mendidik, merawat orang sakit, meneliti dan berjuang demi yang adil adalah kegiatan-kegiatan yang mempunyai nilai juga lepas dari suatu iman, dan oleh karena itu juga diingerti dan dilakukannya oleh orang yang beragama lain atau yang ateis, walaupun dengan minat, tujuan, semangat dan sikap yang berbeda. Tugas-tugas ini adalah "tugas duniawi" atau "perutusan duniawi" (cf. LG 31). Adalah tugas kaum awam untuk menjalankan tugas-tugas "duniawi" itu dalam semangat Yesus Kristus dan dengan demikian menjadi garam yang meresapi dunia.

(b) Panggilan sekunder. Namun Paus menegaskan bahwa tugas-tugas duniawi itu dapat juga dijalankan oleh seorang imam secara subsidier. Artinya sejauh belum dijalankan oleh umat. Dalam keadaan umat belum siap seorang imam dapat menghadirkan Gereja di tengah masyarakat dengan menjalankan tugas-tugas dalam dunia sampai dapat diambil oper dan dikembangkan oleh kaum awam. Dalam sejarah Gereja kaum rohaniwan/wati selalu menjalankan tugas-tugas semacam itu. Misalnya di bidang persekolahan, rumah-rumah sakit dan yatim piatu. Tetapi juga penelitian teologis, filsafat, ilmu-ilmu sosial dijalankan oleh kaum rohaniwan karena kepekaan mereka terhadap injil diharapkan mempunyai dampak khusus terhadap penelitian itu. Di situ termasuk perbagai usaha politis, ekonomis dan sosial. Apabila Gereja melalui kaum awam tidak sanggup untuk hadir dalam usaha-usaha itu, maka kaum awam tidak sanggup untuk hadir dalam usaha-usaha itu, maka kaum rohaniwan, justru karena mereka secara khusus menampakkan dan memersatukan Gereja dapat terjun ke bidang-bidang itu. Namun apabila kaum awam sudah dapat menjalankannya, mereka menarik diri.

(5) Perlu diperhatikan bahwa penjelasan di atas ini berusaha untuk menerangkan latar belakang pemikiran para Paus dalam penentuan tugas masing-masing golongan gerejani dalam kersulan sosial. Distingui antara tugas primer dan sekunder kaum rohani mengandung pelbagai kesulitan. Dalam hal ini pandangan mengenai hakikat Gereja sangat berpengaruh. Jaman sekarang tidak hanya ada pandangan satu saja, maka pendapat yang dikemukakan di atas tidak dapat dikatakan disepakati oleh semua teolog. Barangkali penegasan para Paus dapat diingerti pada latar belakang suatu keprihatinan jangan sampai kaum rohani terkena arus sekularisasi, menjadi malu akan status mereka sebagai orang rohani, dengan iman yang menipis; jadi jangan sampai usaha di bidang keadilan menjadi sekedar pelarian atau usaha untuk menaori suatu identitas yang lebih dapat diterima dalam dunia.

7. Portobatan hati dan perubahan struktur

Dari ucapan-ucapan Paus Johannes Paulus II kita dapat juga belajar suatu sikap yang seimbang dalam mengusahakan keadilan. Beliau berulang kali menuntut reform-reform dan perubahan-perubahan yang berani dan radikal atas nama keadilan dan martabat manusia. Ia melihat eksistensi suatu "dosa struktural" seperti inflasi, pengangguran, sistem-sistem keuangan dan kekuasaan yang tidak adil (Puebla dll.). Dalam LE pengaruh unsur-unsur struktur atas kedudukan kaum buruh dibicarakan dengan panjang lebar di bawah judul "majikan tidak langsung". Namun di lain pihak Paus bersikap skeptis terhadap perubahan struktural yang tidak disertai perubahan hati. Berkatalah Beliau: "Manusia hanya akan maju di jalan perubahan struktur-struktur kehidupan ekonomi yang mutlak perlu apabila benar-benar terjadi juga suatu perubahan mentalitas, kehendak dan hati" ("Redemptor Hominis" 16). Hanya bersamaan dua-duanya dapat menghapus ketidakadilan: perubahan struktural yang disertai perubahan hati.

8. Pertimbangan-pertimbangan

a. Pendekatan konsensus dan pendekatan konflik

Kadang-kadang dibedakan antara pendekatan konsensus dan pendekatan konflik. Dengan pendekatan konsensus dimaksud bahwa penghapusan ketidakadilan dalam masyarakat tidak diusahakan melalui konfrontasi mereka yang diperlakukan dengan tidak adil terhadap para pelaku ketidakadilan, melainkan dengan cara menyadarkan mereka yang berkuasa dalam polngai segi kehidupan masyarakat supaya mereka sadar akan tanggungjawab mereka dalam menciptakan keadilan. Sedangkan pendekatan konflik mengatakan bahwa struktur-struktur yang tidak adil hanya dapat dibongkar melalui jalan konfrontasi.

Namun nampaknya kurang tepat untuk mempertentangkan dua pendekatan itu satu sama yang lain. Tentu saja kita harus berusaha untuk menyadarkan mereka yang berkuasa agar mau menciptakan keadilan. Tetapi karena ketidakadilan untuk sebagian terbesar tertanam dalam struktur proses-proses politik, sosial dan ekonomis, dan proses-proses itu tidak dapat diubah begitu saja oleh satu dua orang pemimpin yang sadar, maka yang bersangkutan berhak untuk memperjuangkan keadilan dan hak-hak mereka. Itulah sejak semula merupakan ajaran Gereja (cf. yang dikatakan tentang QA dan LE). Kaum buruh berhak untuk memperjuangkan upah yang adil dan syarat-syarat kerja yang manusiawi, melalui serikat-serikat mereka, kalau perlu dengan memakai senjata mogok. Hal yang sama berlaku bagi semua kelas dan golongan dalam masyarakat yang menjadi korban ketidakadilan atau yang hak-haknya dirampas. Menolak hak perjuangan itu, misalnya atas nama suatu faham kekeluargaan yang semu, adalah, selain bertentangan dengan ASG, suatu tipuan terhadap mereka yang diperlakukan dengan tidak adil.

b. Masalah kekerasan

Yang ditolak oleh pimpinan Gereja bukan perjuangan dan konflik, melainkan kekerasan. Penolakan terhadap kekerasan adalah tema yang secara konsisten kembali dalam hampir semua ucapan Paus Johannes Paulus II tentang masalah sosial. Dengan kekerasan dimaksud pemaksaan fisik secara langsung, penggunaan senjata, perusakan benda, penumpahan darah. Tidak sulit untuk memahami mengapa kekerasan secara prinsipial ditolak: sebagai pemaksaan suatu kehendak secara langsung pada kehendak lain kekerasan adalah bertentangan dengan martabat manusia sebagai makhluk yang berakal budi dan bebas. Maka perjuangan demi keadilan tidak boleh melalui kekerasan. Prinsip itu perlu dipertahankan karena pelanggaran-pelanggarannya dapat merusak citra injili perjuangan kristiani demi keadilan.

Namun perlu juga kita perhatikan tiga hal: (1) Apabila suatu masyarakat yang sudah berpuluh-puluh tahun lamanya dihisap dan ditindas akhirnya memberontak (ingat akan perjuangan Kemerdekaan yang juga terkena kualifikasi terhadap kekerasan itu!), jangan lantas cepat-cepat mengutuk mereka yang memberontak. Yang pertama-tama adalah penghisapan dan penindasan itu. (2) Apabila penghisapan tenaga kerja orang kecil dan pelanggaran terhadap hak-hak dasar mereka didukung oleh penindasan yang keras (misalnya yang memprotes atau mogok ditangkap), maka keadaan itu sendiri merupakan suatu

kekerasan terus menerus. Juga disebut kekerasan yang melembaga atau kekerasan struktural. Semakin nyata, real, aktual dan kasar penindasan itu, semakin besar hak mereka yang ditindas untuk melawan. Dan dengan denikian kita sampai pada butir (3): Menurut ajaran Gereja setiap orang berhak untuk menakai kekerasan untuk melawan kekerasan yang langsung dilakukan terhadapnya (saya boleh memukul seorang yang mau menjambret jam saya). Itulah sebabnya PP dalam nr. 31 tidak mutlak dalam penolakan kekerasan. Apabila setiap usaha untuk secara damai menuntut dan memperjuangkan keadilan dijawab dengan tindakan kekerasan, kita jangan heran apabila sikap itu akhirnya melahirkan kekerasan pula.

c. Sekali lagi: berfihak pada kaum miskin

Akhirul kata perlu disadari bahwa kita sebagai orang kristiani tidak bisa berfihak pada kedua-dua belah pihak: pada mereka yang dihisap, dan pada mereka yang menghisap. Tentu saja, secara individual setiap orang dari setiap golongan sama haknya atas perhatian dan cinta kita. Tetapi secara kelompok, kalau kita mau membantu kaum tertindas kita harus berfihak pada mereka dalam perjuangan demi hak-hak mereka. Itu dengan sendirinya akan berarti mengancam kepentingan para penindas. Maka berfihak pada mereka yang lemah membawa resiko bahwa kita akan dimusuhi oleh mereka yang kaya dan berkuasa, akan kehilangan privilese-privilese, kehilangan "nama baik" dalam pandangan mereka - walaupun kita sedikit pun tidak memusuhi dan tidak mau merugikan mereka. Terpaksa kita akan harus memilih apakah kita lebih senang bergaul akrab dengan golongan yang berkuasa, mendapat banyak keuntungan, merasa dihormati, bebas dari gangguan, atau betul-betul ikut memperjuangkan hak-hak kaum kecil. Namun perlu diperhatikan: yang diusahakan Gereja bukanlah revolusi, tidak ada yang mau ditumbangkan. Yang diperjuangkan hanyalah keadilan dan keseimbangan yang wajar. Hal itu dalam jangka panjang akan menguntungkan semua, termasuk golongan atas.

==ooOoo==

Singkatan-singkatan yang dipergunakan:

- ASG = Ajaran Sosial Gereja
- EN = Surat Apostolik Paus Paulus VI "Evangelii Nuntiandi"
- GeS = Konstitusi Konsili Vatikan II "Gaudium et Spes"
- LE = Ensiklik Paus Johannes Paulus II "Laborem Exercens"
- LG = Konstitusi Konsili Vatikan II "Lumen Gentium"
- MM = Ensiklik Paus Johannes XXIII "Mater et Magistra"
- OA = Surat Paus Paulus VI "Octogesima Adveniensi"
- OR = Osservatore Romani, edisi mingguan berbahasa Jerman
- FBB = Perserikatan Bangsa-Bangsa
- PP = Ensiklik Paus Paulus VI "Progressio Populorum"
- PT = Ensiklik Paus Johannes XXIII "Pacem in Terris"
- QA = Ensiklik Paus Pius XI "Quadragesimo Anno"
- RR = Ensiklik Paus Leo XIII "Rerum Novarum"

D A F T A R I S I

<u>Bab I: Pengantar permasalahan</u>	1
1. Pendahuluan	1
2. Apa itu Ajaran Sosial Gereja?	1
3. Sisipan: kekurangan dan ketidakadilan	1
4. Jaman sekarang	2
5. Pembagian diktat	6
<u>Bab II: Injil dan masalah keadilan</u>	2
1. Yesus Kristus dan keadilan	2
a. Yesus bukan pembebas sosial	2
b. Yesus mencintai kita	2
c. Gereja Purba	3
2. Sebuah refleksi	3
a. Dua arah cinta sejati	3
b. Masalah struktur	4
c. Injil membawa kebebasan	4
d. Menghilangkan salib?	5
e. Kesimpulan	5
<u>Bab III.: Wewenang Gereja di bidang pengaturan masyarakat</u>	7
1. Yang menjadi masalah	7
2. Dua sumber wewenang ASG	7
3. Tidak bersifat mutlak	7
4. Dari pendekatan guru ke pendekatan nabi	8
5. Ajaran Sosial Gereja mengenai apa?	8
6. Proses pembentukan Ajaran Sosial Gereja	9
7. Dua contoh perkembangan teori dari bawah	9
a. Imam buruh	9
b. Teologi Pembebasan	10
<u>Bab IV: Perkembangan Ajaran Sosial Gereja Katolik</u>	11
1. Tiga tahap perkembangan kesadaran sosial Gereja	11
(1) Tahap karitatif	11
(2) Tahap normatif sektoral	11
(3) Tahap politis global	11
2. Ringkasan isi dokumen Ajaran Sosial Gereja terpenting	12
(1) Leo XIII: RERUM NOVARUM (1891)	12
(2) Pius XI: QUADRAGESIMO ANNO (1931)	12
(3) Johannes XXIII: MATER ET MAGISTRA (1961)	13
(4) Johannes XXIII: PACEM IN TERRIS (1963)	13
(5) Konsili Vatikan II: CAUDIUM ET SPES (1965)	14
(6) Paulus VI: PROGRESSIO POPULORUM (1967)	14
(7) Paulus VI: OCTOGESIMA ADVENIENS (1971)	14

(8) Paulus VI: EVANGELII NUNTIANDI (1975)	15
(9) Johannes Paulus II: LABOREM EXERCENS (1981)	15
<u>Bab V: Beberapa pokok ajaran sosial Gereja</u>	16
1. Tentang Hak milik pribadi	16
2. Hubungan kerja	16
a. Martabat pekerjaan	16
b. Upah yang adil	16
c. Hak untuk berserikat	17
d. Tugas negara	17
3. Kapitalisme dan Sosialisme	17
a. Kapitalisme	17
b. Sosialisme	18
4. Negara-negara berkembang	19
5. Hak-hak asasi manusia	19
6. Dua masalah yang semakin mendesak	19
a. Perang dan persenjataan	19
b. Masalah lingkungan	20
7. Penutup: dua prinsip dasar	20
a. Prinsip solidaritas	20
b. Prinsip subsidiaritas	20
<u>Bab VI: Kerasulan sosial dalam Gereja</u>	21
1. Pengantar	21
2. Pendasaran kristologis	21
3. Berfihak pada kaum miskin	21
4. Tugas Gereja sebagai pengemban jabatan nabi	22
5. Usaha Gereja bersifat bukan-politik dan politik	22
6. Tugas hirarki dan tugas kaum awam	23
7. Pertobatan hati dan perubahan struktur	25
8. Pertimbangan-pertimbangan	25
a. Pendekatan konsensus dan pendekatan konflik	25
b. Masalah kekerasan	25
c. Sekali lagi: berfihak pada kaum miskin	26
<u>Daftar istilah yang dipergunakan</u>	26
<u>Daftar isi</u>	27

Pertanyaan-pertanyaan tentang isi diktat Ajaran Sosial Gereja Katolik

Tentang bab II:

1. Mengapa pemajuan keadilan merupakan bagian integral pewartaan injil?
2. Apa hubungannya antara isi pewartaan Yesus Kristus dan keadilan?
3. Dalam arti apa injil membawa kebebasan?
4. Mengapa Gereja baru sekarang memperhatikan masalah struktur?
5. Apa yang dimaksud dengan dua faham injil yang ekstrim:
 - (1) Individualisme keselamatan, spiritualisme, supernaturalisme?
 - (2) Horisontalisme dan sekularisasi injil?

Tentang bab III:

1. Manakah sumber-sumber pengertian Gereja tentang bagaimana kehidupan sosial-ekonomis-politik-budaya masyarakat harus ditata?
2. Apakah tingkat kepastian ajaran sosial Gereja?
3. Apa yang dimaksudkan dengan pendekatan guru dan pendekatan nabi dan mengapa Gereja dalam ajaran sosialnya mengutamakan pendekatan nabi?
4. Bagaimana Gereja mengetahui masalah-masalah mana yang perlu diperhatikan olehnya?
5. Bagaimana proses pembentukan ajaran sosial Gereja sebagai keseluruhan?
6. Ajaran Sosial Gereja dialamatkan kepada siapa?

Tentang bab IV:

1. Apa yang dimaksud dengan tiga tahap perkembangan kesadaran sosial Gereja?
2. Sebutkan dokumen-dokumen ASG yang terpenting dan apa yang menjadi titik berat masing-masing dokumen itu?

Tentang bab V:

1. Apa ajaran pokok Gereja tentang hak milik pribadi?
2. Bagaimana Gereja menilai liberalisme, kapitalisme dan sosialisme?
3. Apa yang menjadi prinsip dasar pengaturan hubungan kerja?
4. Sebutkan beberapa hak manusia pekerja yang secara eksplisit diakui Gereja!
5. Apa ajaran Gereja tentang upah yang adil?
6. Di mana letak masalah ketidakadilan dalam hubungan dengan negara-negara berkembang?
7. Sebutkan beberapa tindakan struktural untuk memajukan keadilan bagi kaum buruh dan kaum tani kecil/buruh tani!
8. Di mana sikap Gereja mengenai hak-hak asasi manusia dapat diketemukan?
9. Sebutkan beberapa bidang baru yang mulai disadari Gereja sebagai tantangan!
10. Apa yang dimaksud dengan prinsip solidaritas dan prinsip subdiaritas?

Tentang bab VI:

1. Dalam arti apa keterlibatan sosial Gereja bersifat politik dan dalam arti apa tidak?
2. Apa perbedaan antara peranan kaum imam dan kaum awam dalam hal sosial?
3. Apa hubungan antara pertobatan hati dan perombakan struktur?
4. Bagaimana Gereja melihat usahanya di bidang sosial dalam hubungan dengan usaha fihak-fihak lain?

Filsafat Sosial Kristiani (Ajaran Sosial Gereja Katolik)

Bacaan Wajib:

1. Perjuangan Asia untuk Kemanusiaan paripurna: pernyataan konferensi teolog se Asia, Vennapuwa 7-20 Januari 1979, Jakarta: Mekar Warga Luceat, 1979.
2. Pedro Arrupe, Menjadi Saksi Keadilan, Jakarta: CLC, 1973.

Bacaan Anjuran:

1. Marcel Beding 1965: Adjaran Sosial Geredja: Serun Nowarun, Quadragesimo Anno, Amanat Pentekosta 1941, Mater et Magistra, Pacem in Terris, Cet. ke-2, Ende: Nusa Indah/Arnoldus.
2. Konsili Vatikan II (t.t.): Konstitusi Pastoral "Gaudium et Spes" tentang Gereja dalam dunia modern, Ende: Arnoldus.
3. Paulus VI 1969: Populorum Progressio - Perkembangan Bangsa-bangsa, Ende: Nusa Indah/Arnoldus.
4. Paulus VI 1971: Surat Apostolik "Octogesima Adveniens" dari Paus Paulus pada ulangtahun ke-80 Ensiklik "Serun Nowarun", Ende: Nusa Indah/Arnoldus.
5. Paulus VI 1977: Pewartaan Injil kepada Bangsa-bangsa: Amanat Apostolik Evangelii Nuntiandi dari Paus Paulus VI tentang Evangelisasi di dalam dunia modern, Ende: Nusa Indah/Arnoldus.
6. Johannes Paulus II 1981: Ensiklik Laborem Exercens, Tentang Makna Kerja Manusia Pada Ulangtahun Kesembilanpuluh Ensiklik Serun Nowarun, Ende: Nusa Indah, 1984.
7. J. Eagleson & Ph. Scharper (ed.) 1979: Puebla and Beyond: Documentation and Commentary, New York: Orbis Books.
8. Papal Speeches on Social Issues in the Philippines, Manila: OHDFABC, 1981.
9. A. Heuken 1982: Ajaran Sosial Gereja, Jakarta: Cipta Loka Caraka (cetak ulang dan saduran kembali dari "Cukup Sosialkah Gereja?" CLC 1973).
10. B. Kieser 1982: "Keterlibatan Sosial Gereja: demi pembangunan atau inkulturasi?" dalam: Rohani 29 nr. 12 (Des. 1982), hal. 386-396.
11. D. Dorr: Option for the Poor: a Hundred Years of Vatican Social Teaching Dublin: Gill/Macmillan 1983.
12. S. Mauerwas: A Community of Character. Toward a Constructive Christian Social Ethic; Notre Dame/London: University of Notre Dame 1981.
13. Th. S. Derr: Barriers to Ecumenism: the Holy See and the World Council on on Social Questions, New York: Orbis Books 1983.